

**KAJIAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN  
SESUAI KARAKTERISTIK KABUPATEN BARITO KUALA  
DALAM RANGKA MENINGKATKAN STATUS DESA  
DI KABUPATEN BARITO KUALA**



Oleh  
Tim Peneliti



**KERJASAMA :**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DAN**  
**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

2018


Judul	: Kajian Model Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Sesuai Karakteristik Kabupaten Barito Kuala Dalam Rangka Meningkatkan Status Desa Di Kabupaten Barito Kuala
Ketua/Penanggung Jawab :	
Nama	: Dr. Jamaluddin, M.Si
NIP	: 19590705 198903 1 001
Instansi	: Program Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat
Anggaran	: Rp. 149.000.000 (Seratus empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 05/PPK/Bappelitbang/2018 Tanggal 19 September 2018
Anggota	: 1. Netty Herawaty, S.IP, M.Si 2. Dr. Muhammad Riduansyah Syafari, S.Sos, MPA 3. Farah Qubayla, S.IP, M.P.S 4. Pathurrahman, S.Sos, MA
Enumerator	: 10 Orang
Administrasi	: 4 Orang

Banjarmasin, September 2018

Mengetahui,  
Dekan,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,



**Prof. Dr. H. Asmu'i, M.Si**  
NIP. 195811181987031004



**Ketua Program**  
**Magister Ilmu Pemerintahan**  
**Dr. Jamaluddin, M.Si**  
NIP. 195907051989031001

Judul : Model Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Sesuai Karakteristik Kabupaten Barito  
Kuala Dalam Rangka Meningkatkan Status Desa Di Kabupaten Barito Kuala

Ketua/Penanggung Jawab :

Nama : Dr. Jamaluddin, M.Si

NIP : 19590705 198903 1 001

Instansi : Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat

Anggota :

1. Netty Herawaty, S.IP, M.Si
2. Farah Qubayla, S.IP, M.P.S
3. Pathurrahman, S.Sos, MA
4. Muhammad Yasier, M.Sc

Enumerator : 10 Orang

Administrasi : 4 Orang

Anggaran : Rp. 149.000.000

Banjarmasin, September 2018

Mengetahui,  
Dekan,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,



**Prof. Dr. H. Asmu'i, M.Si**  
NIP. 195811181987031004



Ketua Program  
Magister Ilmu Pemerintahan



**Dr. Jamaluddin, M.Si**  
NIP. 195907051989031001



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Sholawat dan salam kepada Rasul akhir zaman Muhammad SAW. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Penelitian dengan judul **“Kajian Model Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Sesuai Karakteristik Kabupaten Barito Kuala Dalam Rangka Meningkatkan Status Desa Di Kabupaten Barito Kuala”**.

Selesainya Laporan Hasil Penelitian ini tentu tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Bapak Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si, M.Sc.
2. Bupati Kabupaten Barito Kuala Ibu Hj. Normiliani As
3. Dekan FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Bapak Prof. Dr. H. Asmu'i, M.Si
4. Kepala Bappelitbang, Kabupaten Barito Kuala beserta jajarannya.
5. Camat di Seluruh Kecamatan se Kabupaten Barito Kuala beserta jajarannya.
6. Kepala Desa seluruh Kecamatan se Kabupaten Baito Kuala beserta jajarannya.
7. Peserta FGD dan Enumerator Penelitian

Semoga Laporan Hasil Penelitian ini dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk perkembangan pengetahuan bagi penulis maupun bagi pihak yang berkepentingan.

Banjarmasin, September 2018

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Sasaran Penelitian.....	6
1.5 Keluaran .....	7
1.6 Hasil (out come) .....	7
1.7 Lokasi Kegiatan.....	7
1.8 Rencana Penelitian .....	7
1.9 Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan .....	8
1.10 Personil.....	9
1.11 Sumber Dana .....	9
<b>BAB II</b>	
<b>KERANGKA KONSEPTUAL DAN METODOLOGI..</b>	<b>10</b>
2.1 Kerangka Konseptual .....	10
2.1.1 Posisi Relasi Desa menurut UU No. 06 Tahun 2014 .....	10
2.1.2 Model Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	15
2.1.3 Desa dan Modal Sosial .....	17
<b>BAB III</b>	
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Pendekatan dan Fokus Penelitian.....	26
3.2 Lokasi Penelitian.....	26
3.3 Sumber Data.....	26
3.1.1 Informan .....	27
3.1.2 Teknik Pengumpulan Data .....	27

3.4	Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
4.1	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Barito Kuala ...	31
4.2	Gambaran Umum Wilayah Kecamatan .....	34
1.	Kondisi Geografis, Potensi Ekonomi dan Sosial Kecamatan Tamban .....	36
2.	Kecamatan Jejangkit .....	42
3.	Kecamatan Kuripan .....	45
4.	Kecamatan Alalak .....	51
5.	Kecamatan Tabukan.....	57
6	Kecamatan Anjir Muara.....	62
7.	Kondisi Geografis, Potensi Ekonomi dan Sosial Rantau Badauh.....	67
8.	Kecamatan Mandastana .....	74
<b>BAB V</b>	<b>MODEL ALTERNATIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PERTANIAN DI KABUPATEN BARITO KUALA .....</b>	<b>79</b>
5.1	Karakteristik Modal Manusia (Human Capital) Masyarakat Di Kabupaten Barito Kuala .....	81
5.2	Modal Sosial di Masyarakat Berbasis Pertanian di Kabupaten Barito Kuala .....	85
5.3	Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Produk Pertanian Di Kabupaten Barito Kuala .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel	Nama Tabel	Hal
1	Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala menurut Kecamatan, 2016	31
2	PDRB Kabupaten Barito Kuala Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (2012-2016)	33
3	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016	35
4	Jumlah Desa dan Penduduk di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017	37
5	Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Jejangkit	43
6	Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Kuripan	46
7	Rata-Rata Penduduk Per Desa di Kecamatan Kuripan, 2017	48
8	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Alalak	52
9	Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Tabukan	57
10	Rata-Rata Penduduk Per Desa di Kecamatan Tabukan, 2017	58
11	Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Anjir Muara	63
12	Rata-Rata Penduduk Per Desa di Kecamatan Anjir Muara, 2017	64
13	Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Rantau Badauh	68
14	Rata-Rata Penduduk Per Desa di Kecamatan Rantau Badauh, 2017	69
15	Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Tiap Desa di Rantau Badauh, 2016	70
16	Produksi Pertanian, Tanaman Sayuran, Buah-Buahan dan Perkebunan Selain Tanaman Padi, 2017	72
17	Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Mandastana	74
18	Rata-Rata Penduduk Per Desa di Kecamatan Mandastana, 2017	75

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu. Untuk menggerakkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, diperlukan dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan peran dan posisinya dalam kerangka membangun masyarakat madani. Proses penyadaran masyarakat dilakukan melalui konsep pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas masyarakat adalah bentuk dari pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Apabila masyarakat sebagai pihak yang paling berkepentingan belum memahami makna pengembangan kapasitas dan tidak memberikan tanggapan positif terhadap upaya pengembangan kapasitas yang dilaksanakan maka bisa dipastikan upaya tersebut tidak akan berdaya guna dan berhasil sesuai tujuan yang ingin dicapai. Karena itu perlu disadari bahwa Pemberdayaan (*empowerment*) hadir sebagai proses panjang yang disebabkan terjadinya "*dispowerment*" yaitu peniadaan *power* pada sebagian masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap asset produktif yang umumnya dikuasai para pemilik "*power*". Pemaknaan pemberdayaan



masyarakat sebenarnya merupakan upaya menjadikan masyarakat menjadi tidak tergantung pada program-program pemberian (*charity*), tetapi mendorong terciptanya kemandirian dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan (*sustainable*). Pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya (Dadang Solihin: 2007). Berdasarkan pendapat tersebut, maka konsep pemberdayaan merupakan konsep pembangunan di bidang ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep pemberdayaan masyarakat pun merupakan paradigma baru dalam pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995). Upaya memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, diharapkan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat mampu menciptakan kondisi yang stabil di lingkungan masyarakat secara berkelanjutan. Pada berbagai program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah, terlihat kondisi yang masih kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, menumbuhkan ketergantungan masyarakat pada bantuan luar, tercipta benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan, dan lainnya). Lemahnya sosial kapital pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian mengatasi persoalannya secara bersama. Kemandirian lembaga masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum ekonomi, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan

publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin (*pro poor*) dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), baik ditinjau dari aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan analisis terhadap kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan pemerintah. Analisis tersebut merupakan salah satu upaya untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih berpihak kepada lapisan miskin dan marjinal. Sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan lainnya seperti prasarana dan sarana fisik di bidang transportasi, komunikasi, perumahan, kesehatan, yang lebih diarahkan kepada kecamatan atau desa/kelurahan yang masih tertinggal atau pembangunan fisik yang diarahkan untuk meningkatkan dan mempercepat perolehan dampak kepada perkembangan ekonomi wilayah. Dalam kajian ini, ada model yang bisa menjadi referensi untuk memperkuat hasil kajian tentang model pemberdayaan masyarakat pedesaan sesuai karakteristik Kabupaten Barito Kuala dalam rangka meningkatkan status desa di Kabupaten Barito Kuala. Disamping itu diharapkan bisa dijadikan model untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala, dan ini merupakan peluang dan potensi yang dapat dikembangkan dengan serius, selama semua pihak memiliki komitmen yang kuat untuk program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala. Kepada aparat dan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala akan diminta pendapatnya secara mendalam tentang beberapa model pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan pendekatan potensi dan peluang.

Model pertama adalah proses perkembangan industri kecil bidang hasil pertanian di Kabupaten Barito Kuala yang diharapkan berdampak langsung terhadap berubahnya kondisi *fisiobiografis* lingkungan pedesaan. Penelitian ini berupaya

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya di antaranya adalah: faktor internal desa, hubungan antar-desa dan hubungan antara desa dengan kawasan industri kecil hasil pertanian yang dimungkin pada tempat tertentu. Penelitian ini berupaya menemukan model agar muncul adanya indikasi-indikasi perubahan di antaranya adalah ; a) Homogenitas kehidupan desa secara perlahan semakin berkurang; b) Bergesernya mata pencaharian dari pertanian tradisional menjadi industri hasil hasil pertanian yang dibina oleh instansi pemerintah bekerjasama dengan pihak pihak. c) Berubahnya fungsi lahan pertanian yang tidak pada satu jenis tanaman, tetapi beragam hasil pertanian yang diarahkan terciptanya industri kecil hasil pertanian. d) Berubahnya pola hidup dan sistem sosial masyarakat.

Perubahan-perubahan yang terjadi di atas bagi masyarakat diharapkan berdampak pada seluruh aspek lingkungan kehidupan, sehingga masyarakat kemudian melakukan strategi adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Oleh sebab itu, kondisi tersebut memerlukan penanganan dan pengelolaan sumberdaya lingkungan perdesaan secara komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga berupaya melakukan identifikasi terhadap modal sosial (*social capital*), sumberdaya lainnya melalui *social mapping*, maka dilakukan Analisa SWOT yang merupakan landasan penting untuk melakukan strategi pemberdayaan masyarakat (*community development*) yang terpadu seiring dengan berkembangnya model pendekatan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) sebagai antitesis dari model pembangunan yang berpusat pada industri (*production centered development*). Pendekatan ini menyadari kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol atas sumber daya materi dan nonmaterial yang penting. David Korten (dalam Adimihardja, 2001: 377) menyatakan bahwa ada tiga dasar untuk melakukan perubahan-perubahan struktural

dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada manusia, yaitu: a). Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijaksanaan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri pada tingkat individual, keluarga dan komunitas; b). Mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah swa-organisasi; c). Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang diorganisasi secara territorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat menjadi sesuatu yang penting dikembangkan sesuai dengan sosio-kultural masyarakat di Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan strategi dan pola adaptasi yang dikembangkan oleh masyarakat sekitar. Model perencanaan sosial tersebut juga berlaku secara menyeluruh, sehingga ada mata rantai aktivitas yang sinergis dari berbagai pihak. Sebagaimana dikemukakan oleh Isbandi Rukminto Adi (2001: 60) bahwa model pengembangan masyarakat (*community development*) pada intinya bertujuan mengembangkan kemandirian masyarakat. Bentuk partisipasi yang diharapkan adalah masyarakat mampu mendefinisikan dan mencoba memenuhi kebutuhan mereka sendiri melalui metode proses kreatif dan kooperatif serta pembentukan kelompok-kelompok keswadayaan.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi gambaran umum pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan di Kabupaten Barito Kuala?
- b. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung (masalah dan peluang) dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala?
- c. Bagaimanakah strategi dan pola kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala?

### 1.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk menyusun dokumen model pemberdayaan masyarakat pedesaan sesuai karakteristik Kabupaten Barito Kuala dalam rangka meningkatkan status desa di Kabupaten Barito Kuala

### 1.2. Sasaran Penelitian

- a. Menyediakan informasi tentang kondisi gambaran umum pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan di Kabupaten Barito Kuala.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung (masalah dan peluang) dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala.
- c. Mengungkapkan strategi dan pola kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala

### **1.5. Keluaran**

Output dari kegiatan penelitian ini adalah (hard copy dan soft copy)

- a. Buku Laporan Awal dokumen model pemberdayaan masyarakat pedesaan sesuai karakteristik Kabupaten Barito Kuala dalam rangka meningkatkan status desa di Kabupaten Barito Kuala
- b. Buku Laporan akhir dokumen model yang memuat strategi dan pola kebijakan pemberdayaan masyarakat pedesaan sesuai karakteristik Kabupaten Barito Kuala dalam rangka meningkatkan status desa di Kabupaten Barito Kuala

### **1.6. Hasil (out come)**

Tersedianya sebuah rancangan model yang memuat strategi dan pola kebijakan pemberdayaan masyarakat pedesaan sesuai karakteristik Kabupaten Barito Kuala dalam rangka meningkatkan status desa di Kabupaten Barito Kuala

### **1.7. Lokasi Kegiatan**

Wilayah Kabupaten Barito Kuala

### **1.8. Rencana Pekerjaan**

Tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen yang memuat strategi dan pola kebijakan atau model pemberdayaan masyarakat pedesaan sesuai karakteristik Kabupaten Barito Kuala dalam rangka meningkatkan status desa di Kabupaten Barito Kuala ini, terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a). Persiapan.

Pada tahun ini dilakukan penyiapan tim kerja yang terdiri dari tenaga ahli, tenaga pendukung administrasi, enumerator dalam pengumpulan data, dan mengidentifikasi data awal yang diperlukan.

- b) Pengumpulan data sekunder dan literature yang relevan
- c) Diskusi awal penyusunan laporan pendahuluan
- d) Identifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung (masalah dan peluang) dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala
- e) Analisis dan pengolahan data
- f) Analisis kebijakan
- g) Analisis kewilayahan.
- h) Penyusunan draf laporan akhir
- i) Penyusunan laporan akhir.

### 1.9. Jangka Waktu Penyelesaian kegiatan

Pekerjaan dilaksanakan tahun 2018 selama 3 bulan atau 90 hari kalender setelah penanda tangan kontrak.

No	Kegiatan	September				Oktober				Nopember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan												
2	Pengumpulan Data												
3	Pengolahan dan analisis Data												
4	Pelaporan												

### 1.10. Personil

Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kajian ini adalah :

- a. 1 orang ahli Kebijakan Publik yang juga bertindak sebagai Koordinator Tim  
Tenaga ahli dengan kualifikasi pendidikan S3.
- b. 1 orang ahli Pemerintahan dan Pemberdayaan Desa
- c. 1 orang ahli Politik Lokal dan Otonomi Daerah
- d. 1 orang ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tenaga ahli tersebut didukung oleh tenaga pendukung operator komputer dan administrator dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 sebanyak 4 orang serta enumerator pengumpul data primer (pewawancara) sebanyak 10 orang mahasiswa.

### 1.11. Sumber dana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bappeda Kabupaten Barito Kuala tahun 2018.



## BAB II

### KERANGKA KONSEPTUAL DAN METODOLOGI

#### 2.1 Kerangka Konseptual

##### 2.1.1. Posisi dan Relasi Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014

Keberadaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU ini mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas dalam pengaturan Desa. Berbeda dengan UU No.32/2004 yang mengedepankan asas desentralisasi, asas rekognisi dan subsidiaritas di dalam UU Desa yang baru ini menjadi penting dan relevan bagi keberadaan desa di Indonesia karena *Pertama*, desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat merupakan entitas yang berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum yang disebut daerah. *Kedua*, desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan entitas yang sudah ada sebelum NKRI lahir pada tahun 1945, yang sudah memiliki susunan asli maupun membawa hak asal usul. *Ketiga*, desa merupakan bagian dari keragaman atau multikulturalisme Indonesia yang tidak serta merta bisa diseragamkan. *Keempat*, dalam lintasan sejarah yang panjang, desa secara struktural menjadi arena eksploitasi terhadap tanah dan penduduk, sekaligus diperlakukan secara tidak adil mulai dari kerajaan, pemerintah kolonial, hingga pemerintah NKRI. *Kelima*, konstitusi telah memberikan amanat kepada negara untuk mengakui dan menghormati desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Perbedaan antara kedua UU desa tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.

Rekognisi bukan saja mengakui dan menghormati terhadap keragaman desa, kedudukan, kewenangan dan hak asal-usul maupun susunan pemerintahan, namun UU Desa juga melakukan redistribusi ekonomi dalam bentuk alokasi dana dari APBN maupun APBD. Di satu sisi rekognisi dimaksudkan untuk mengakui dan menghormati identitas, adat-istiadat, serta pranata dan kearifan lokal sebagai bentuk tindakan untuk keadilan kultural. Di sisi lain redistribusi uang negara kepada desa merupakan resolusi untuk menjawab ketidakadilan sosial-ekonomi karena intervensi, eksploitasi dan marginalisasi yang dilakukan oleh negara. Bahkan UU Desa juga melakukan proteksi terhadap desa, bukan hanya proteksi kultural, tetapi juga proteksi desa dari imposisi dan mutilasi yang dilakukan oleh supradesa, politisi dan investor.

Penerapan asas rekognisi tersebut juga disertai dengan asas subsidiaritas. Asas subsidiaritas berlawanan dengan asas residualitas yang selama ini diterapkan dalam UU No. 32/2004. Asas residualitas yang mengikuti asas desentralisasi menegaskan bahwa seluruh kewenangan dibagi habis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan terakhir di tangan pemerintah kabupaten/kota. Dengan asas desentralisasi dan residualitas itu, desa ditempatkan dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota, yang menerima pelimpahan sebagian (sisa-sisa) kewenangan dari bupati/walikota.

Tabel 2.1 Perspektif Desa Lama Vs Desa Baru

	Desa Lama	Desa Baru
Payung hukum	UU No.32/2004 dan PP No.72/2005	UU No.6/2014
Asas utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota ( <i>local state government</i> ).	Sebagai pemerintahan masyarakat, <i>hybrid</i> antara <i>self governing community</i> dan <i>local self government</i> .
Posisi dan peran kabupaten/kota	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa.	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.
<i>Delivery</i> kewenangan dan program	Target	Mandat
Politik tempat	Lokasi : Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena : Desa sebagai arena bagi orang desa untuk

		menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan.
Posisi dalam pembangunan	Objek	Subjek
Model pembangunan	<i>Government driven development</i> atau <i>community driven development</i>	<i>Village driven development</i>
Pendekatan dan tindakan	Imposisi dan mutilasi sektoral	Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi

Sumber : Sutoro Eko, dkk (2014)

Prinsip subsidiaritas menegaskan bahwa dalam semua bentuk koeksistensi manusia, tidak ada organisasi yang harus melakukan dominasi dan menggantikan organisasi yang kecil dan lemah dalam menjalankan fungsinya. Sebaliknya, tanggungjawab moral lembaga sosial yang lebih kuat dan lebih besar adalah memberikan bantuan (dari bahasa Latin, *subsidium afferre*) kepada organisasi yang lebih kecil dalam pemenuhan aspirasi secara mandiri yang ditentukan pada level yang lebih kecil-bawah, ketimbang dipaksa dari atas (Alessandro Colombo, 2012). Dengan kalimat lain, *subsidiarity* secara prinsipil menegaskan tentang alokasi atau penggunaan kewenangan dalam tatanan politik, yang notabene tidak mengenal kedaulatan tunggal di tangan pemerintah sentral.

Subsidiaritas terjadi dalam konteks transformasi institusi, sering sebagai bagian dari tawar-menawar (*bargaining*) antara komunitas/otoritas yang berdaulat

(mandiri) dengan otoritas lebih tinggi pusat. Prinsip *subsidiarity* juga hendak mengurangi risiko-risiko bagi subunit pemerintahan atau komunitas bawah dari pengaturan yang berlebihan (*overruled*) oleh otoritas sentral. Berangkat dari ketakutan akan tirani, *subsidiarity* menegaskan pembatasan kekuasaan otoritas sentral (pemerintah lebih tinggi) dan sekaligus memberi ruang pada organisasi di bawah untuk mengambil keputusan dan menggunakan kewenangan secara mandiri (Christopher Wolfe, 1995; David Bosnich, 1996; Andreas Føllesdal, 1999). Dengan bahasa yang berbeda, saya memberikan tiga makna subsidiaritas. *Pertama*, urusan lokal atau kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal lebih baik ditangani oleh organisasi lokal, dalam hal ini desa, yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan kalimat lain, subsidiaritas adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa.

*Kedua*, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui undang-undang. Dalam penjelasan UU No. 6/2014 subsidiaritas mengandung makna penetapan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa. Penetapan itu berbeda dengan penyerahan, pelimpahan atau pembagian yang lazim dikenal dalam asas desentralisasi maupun dekonsentrasi. Sepadan dengan asas rekognisi yang menghormati dan mengakui kewenangan asal usul desa, penetapan ala subsidiaritas berarti UU secara langsung menetapkan sekaligus memberi batas-batas yang jelas tentang kewenangan desa tanpa melalui mekanisme penyerahan dari kabupaten/kota. *Ketiga*, pemerintah tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan tindakan desa dalam

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Tindakan ini sejalan dengan salah satu tujuan penting UU No. 6/2014, yakni memperkuat desa sebagai subjek pembangunan, yang mampu dan mandiri mengembangkan prakarsa dan aset desa untuk kesejahteraan bersama.

Kombinasi antara asas rekognisi dan subsidiaritas itu menghasilkan definisi desa dalam UU Desa yang berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.1.2. Model Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Meskipun pembangunan desa tidak menjadi agenda nasional dalam RPJMN tetapi pemerintah tetap masuk ke desa dengan membawa program pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk penanggulangan kemiskinan. Pendekatan ini menggunakan model pembangunan yang digerakkan masyarakat (*community driven development* – CDD), antara lain hadir dalam bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan lain-lain.

Berbagai program ini tidak sesuai lagi dengan asas rekognisi dan subsidiaritas yang diamanatkan oleh UU Desa. Meskipun K/L hadir ke desa dengan atas nama pemberdayaan masyarakat, tetapi sekarang tidak boleh lagi masuk ke desa, sebab

kandungan program-program itu menjadi domain kewenangan lokal berskala desa, yang menjadi domain (diatur dan diurus) penuh oleh desa. Seorang pejabat eselon III Kementerian Keuangan berujar: “K/L tidak boleh lagi mengatur dan mengurus urusan desa yang ditetapkan oleh UU Desa”.

Sesuai dengan prinsip desa membangun, desa sebagai subjek pembangunan dan tradisi berdesa, maka model pembangunan yang digerakkan masyarakat (*community driven development*–CDD) berubah menjadi pembangunan yang digerakkan oleh desa atau desa menggerakkan pembangunan (*village driven development*–VDD). Dalam buku *Desa Membangun Indonesia* (Sutoro Eko, 2014), VDD mempunyai beberapa karakteristik:

1. Desa hadir sebagai sebuah kesatuan kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa.
2. Kepentingan dan kegiatan dalam pemerintahan dan pembangunan diikat dan dilembagakan secara utuh dan kolektif dalam sistem desa.
3. Kemandirian desa yang ditopang dengan kewenangan, diskresi dan kapasitas lokal.
4. Kepala desa tidak bertindak sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan berdiri dan bertindak sebagai pemimpin masyarakat.
5. Otoritas dan akuntabilitas pemerintah desa yang memperoleh legitimasi dari masyarakat.
6. Desa mempunyai pemerintah desa yang kuat dan mampu menjadi penggerak potensi lokal dan memberikan perlindungan secara langsung terhadap warga, termasuk kaum marginal dan perempuan yang lemah.
7. Demokratisasi desa yang mencakup: (a) institusionalisasi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inklusivitas dan kesetaraan gender; (b) institusi

representasi dan deliberasi; dan (c) pertautan (engagement) antarpelaku di desa.

8. Pelembagaan perencanaan dan penganggaran secara inklusif dan partisipatoris serta berbasis pada aset lokal.
9. Pembangunan berbasis pada aset penghidupan lokal.
10. Dana Alokasi Desa dari pemerintah sebagai bentuk redistribusi ekonomi dari negara dan menjamin keadilan ekonomi bagi desa.
11. Desa bermartabat secara budaya, yang memiliki identitas atau sistem sosial-budaya yang kuat, atau memiliki kearifan lokal yang kuat untuk mengelola masyarakat dan sumberdaya lokal.
12. Satu desa, satu rencana, satu anggaran.
13. Warga yang kritis, aktif dan terorganisir. Ikatan warga dalam komunitas sangat penting tetapi tidak cukup, namun butuh warga yang aktif, melek dan sadar politik terhadap hak dan kepentingan mereka, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa

### **2.1.3. Desa dan Modal Sosial**

Secara teoritik studi Putnam (1993) maupun Fukuyama (1995) menunjukkan bahwa modal sosial merupakan penopang pembangunan ekonomi dan demokrasi. Putnam antara lain mengambil kesimpulan : *“Studi tentang pertumbuhan ekonomi Asia Timur yang cepat hampir selalu menekankan pentingnya jaringan kerja sosial yang padat, sehingga ekonomi ini menggambarkan semacam kapitalisme berjaringan”* (Putnam, 1993). Francis Fukuyama (1995) juga menegaskan argumen



tentang kehebatan modal sosial (kerjasama dan kepercayaan) sebagai penopang keberhasilan kapitalisme di Eropa Barat, Amerika Utara dan Asia Timur.

Namun yang menarik, keberadaan modal sosial di Indonesia sungguh berbeda dengan keyakinan teoritik di atas. Menurut Sutoro Eko (2014), ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa modal sosial di Indonesia. *Pertama*, desa-desa di Indonesia sebenarnya sangat kaya modal sosial tetapi juga rentan secara sosial. Di satu sisi masyarakat desa sudah lama mempunyai beragam ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat, sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Swadaya dan gotong royong telah terbukti sebagai penyangga utama “otonomi asli” desa. Ketika kapasitas negara tidak sanggup menjangkau sampai level desa, swadaya dan gotong royong merupakan sebuah alternatif permanen yang memungkinkan berbagai proyek pembangunan prasarana desa tercukupi. Masyarakat desa juga terbiasa tolong-menolong dan saling membantu antar sesama, apalagi ketika terjadi musibah.

Tetapi, dibalik ikatan sosial dan solidaritas sosial yang menyenangkan itu, masyarakat desa sering menghadapi berbagai kerentanan sosial (*social vulnerability*) yang bahkan bisa melumpuhkan ketahanan sosial (*social security*) mereka. Ketahanan sosial masyarakat desa sangat rentan ketika menghadapi gempuran dari luar, mulai dari regulasi dan kebijakan pemerintah, proyek pembangunan, wabah penyakit menular, narkoba, bencana alam, kekeringan, dan lain-lain. Bahkan bantuan dari pemerintah seperti BLT, kompensasi BBM juga memunculkan kerawanan konflik sosial seperti pertikaian antar warga desa.

*Kedua*, desa kaya modal sosial tetapi tidak kaya modal ekonomi. Dengan kalimat lain, modal sosial itu tidak mengalami transformasi menjadi modal ekonomi.

Studi Edward Miguel, Paul Gertler, dan David I. Levine (2005) di 274 daerah industri di Indonesia, misalnya, menunjukkan bahwa modal sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan industri. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan mengapa modal sosial yang kaya tidak menghasilkan modal ekonomi? Bagaimana dan dimana letak *missing link* antara modal sosial dan modal ekonomi?

Dalam literatur terdapat tiga level dan jenis modal sosial: ikatan sosial (*social bonding*), jembatan sosial (*social bridging*) dan jaringan sosial (*social linking*). *Social bonding* adalah bentuk dan level modal sosial dalam komunitas lokal yang paling rendah, dimana hubungan sosial (kerjasama dan kepercayaan) dibangun berdasarkan kesamaan identitas yang homogen atau berdasarkan ikatan parokhial (keagamaan, kekerabatan, kesukuan, dan lain-lain) yang lebih banyak berorientasi ke dalam secara eksklusif. *Social bridging* merupakan bentuk modal sosial dalam komunitas lokal yang lebih terbuka, heterogen, melampaui ikatan parokhial, yang sangat cocok untuk membangun kerukunan dan perdamaian. Sedangkan *social linking* adalah modal sosial yang melampaui komunitas lokal, berorientasi keluar dan berjaringan lebih luas dengan dunia luar (Briggs 1998; Woolcock dan Narayan 2000; Putnam 2000; Portes dan Landolt 2000, Woolcock 2001).

Menurut Sutoro Eko, *social bonding* yang bersifat parokhial merupakan modal sosial paling dangkal, yang tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi dan demokrasi lokal. Bahkan *social bonding* tersebut mengandung sejumlah sisi negatif, yaitu : (a) eksklusif terhadap orang lain; (b) klaim atas anggota kelompok; (c) pembatasan terhadap kebebasan individu; dan (d) mengabaikan norma, termasuk norma hukum. (Portes dan Landolt, 2000). *Social bonding* yang eksklusif dan miskin

jembatan sosial itu mudah menyebabkan konflik beragam kelompok atau komunitas parokhial (agama, suku, kekerabatan, aliran).

Studi Sutoro Eko dan Borni Kurniawan (2010) di lima daerah (Serdang Bedagai, Gunung Kidul, Lombok Barat, Gowa dan Ambon), menghasilkan temuan adanya hubungan antara institusi lokal berbasis desa dengan modal sosial (ikatan sosial, solidaritas sosial, jembatan sosial, jaringan sosial, dan gerakan sosial). Ada empat institusi lokal yang berbasis desa yang masing-masing memiliki modal sosial secara berbeda, seperti yang tersaji pada tabel 2.1.

*Pertama*, institusi parokhial, sebuah institusi asli di ranah desa yang terbentuk dan memiliki ikatan sosial (*social bonding*) berdasar kesamaan suku, agama, aliran, kerabat, dan unsur-unsur bawaan lainnya. Organisasi semacam ini tidak bisa dikategorikan sebagai organisasi masyarakat sipil karena tidak berorientasi pada kepentingan publik, melainkan berorientasi ke dalam (*inward looking*) yang mendefinisikan secara jelas siapa anggota dan bukan anggota. Mereka berupaya membangun solidaritas internal atau tolong-menolong diantara mereka sendiri (*self help*).

Tabel.2.2. Empat Bentuk Institusi Lokal Berbasis Desa

	<b>Parochial Institutions</b>	<b>Institusi asli (Indigeneous Institutions)</b>	<b>Institusi korporatis bentukan negara</b>	<b>Institusi yang berbasis masyarakat sipil</b>
Proses Pembentukan	Institusi yang dibentuk oleh kesamaan kerabat, keagamaan, kesukuan	Institusi asli yang dibentuk sendiri oleh masyarakat lokal atau desa adat	Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh negara secara seragam pada masa Orde Baru hingga sekarang	Organisasi masyarakat yang dibentuk sendiri oleh masyarakat sipil
Contoh	Paguyuban, arisan keluarga, perkumpulan keagamaan	Lembaga-lembaga adat lokal, gotong royong	LPMD, BKM, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Musrenbang, maupun lembaga-lembaga baru bentukan langsung pemerintah.	Gerakan perempuan peduli desa, <i>community center</i> , komunitas seni, komunitas peduli lingkungan, serikat tani, asosiasi desa.
Nilai-nilai utama	Persahabatan, persaudaraan,	Kecukupan, keseimbangan	Harmoni, partisipasi	Kebebasan,

	kebersamaan.	dan keberlanjutan.		kesetaraan, otonomi.
Tujuan	Menolong diri sendiri diantara para anggota	Mencapai kebaikan bersama secara komunal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrol dan kanalisasi kepentingan masyarakat secara tunggal dan seragam</li> <li>• Sebagai wadah pemberdayaan dan partisipasi.</li> <li>• Untuk melayani program-program pemerintah serta mengambil dan memanfaatkan dana (BLM) dari pemerintah.</li> </ul>	Memperkuat masyarakat, rakyat, publik dan warga sekaligus membuat negara lebih akuntabel dan responsif.

Sumber : Sutoro Eko (2014)

Karakter parokhial juga bisa melembaga dalam struktur dan sistem desa, jika pengaruh agama dan kekerabatan sangat dominan dan menjadi orientasi utama penyelenggaraan desa. Pengaruh agama dan kekerabatan sangat kuat. Ada desa parokhial berbasis kekerabatan dan desa parokhial berbasis agama. Desa parokhial berbasis kekerabatan memiliki *social bonding* yang kuat, tetapi umumnya miskin *social bridging* antarkerabat. *Social bonding* berbasis kekerabatan itu menjadi basis kompetisi politik dan pembentukan struktur politik desa. Karena itu dalam desa ini

menjalankan prinsip “aliran sumberdaya mengikuti aliran darah”. Penempatan berbagai posisi penting (perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, panitia pembangunan dan lain-lain) maupun alokasi dana bantuan sangat dipengaruhi oleh preferensi kekerabatan itu. Sedangkan desa parokhial berbasis agama bercirikan desa yang religius. Kepemimpinan dan kegiatan sosial mengutamakan Tuhan, agama dan surga. Kegiatan keagamaan maupun sarana ibadah sangat dominan sebagai ukuran keberhasilan desa. Mereka tidak memiliki kesadaran kolektif terhadap isu-isu publik seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi maupun lingkungan.

*Kedua*, institusi asli (*indigenous institution*) yang berbasis pada adat. Pengaruh adat jauh lebih kuat daripada pengaruh pemerintah dan agama. Desa adat, masyarakat adat maupun lembaga adat termasuk institusi asli ini. Mereka memiliki *self governing community* yang memiliki pranata dan kearifan lokal, yang mengutamakan keteraturan dan keseimbangan: *social order*, *ecological order* dan *spiritual order*. Mereka juga memiliki tradisi demokrasi komunitarian, yakni mengutamakan kebaikan bersama, dengan model pengambilan keputusan secara deliberatif melalui institusi-institusi asli. Institusi asli mengedepankan emansipasi dalam merawat harmoni sosial dan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan tetapi tidak terbuka terhadap isu-isu publik kekinian. Mereka juga melakukan eksklusi terhadap kaum perempuan dan rakyat kecil yang tidak punya “tanah” dan “darah”, sekaligus eksklusi terhadap orang lain yang berbeda.

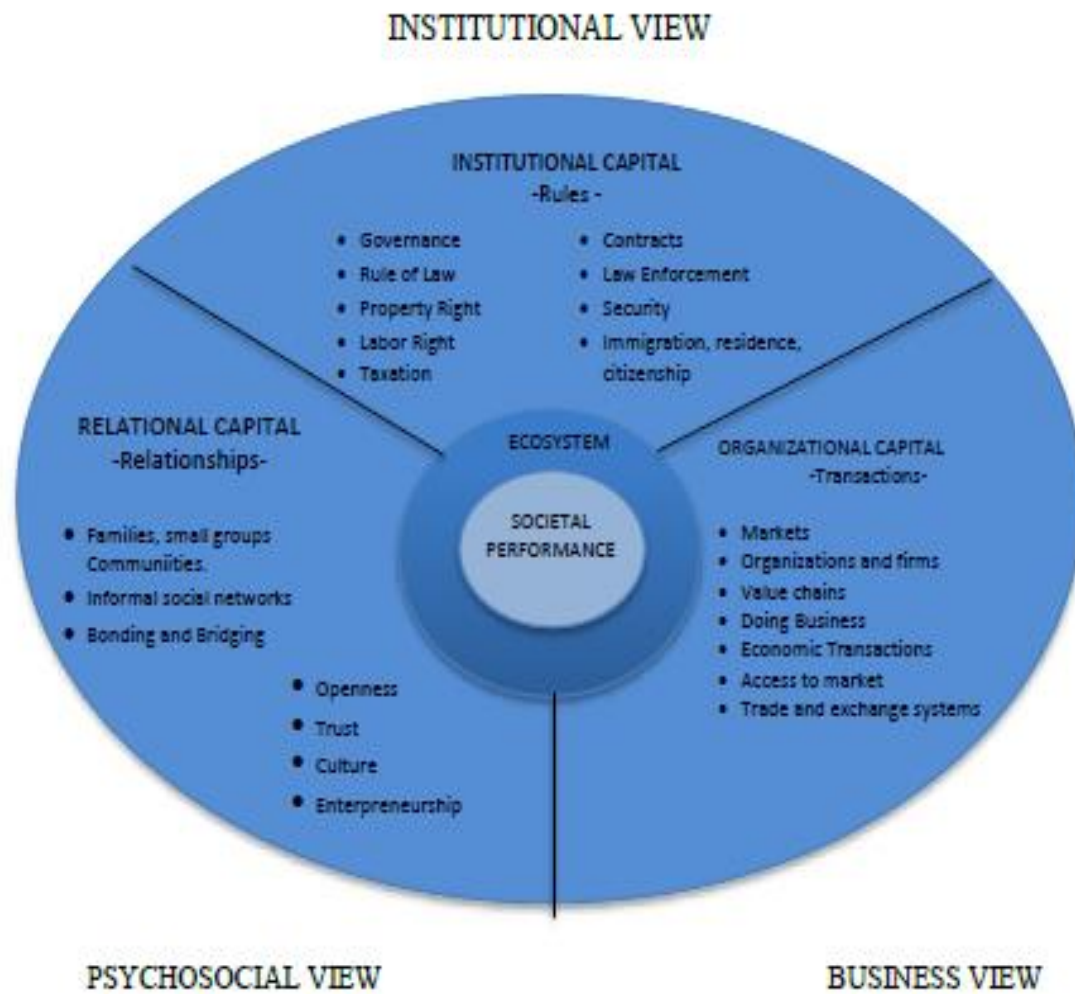
*Ketiga*, institusi korporatis yang dibentuk oleh negara di ranah desa. Desa selama puluhan tahun telah dikonstruksi sebagai institusi korporatis, demikian juga dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun kelompok-kelompok penerima manfaat dari program pemerintah. Desa sebagai kepanjangan tangan

pemerintah/negara dalam menjalankan tugas-tugas administratif untuk mengontrol penduduk dan tanah. Berbeda dengan institusi asli dan parokhial yang kaya dengan social bonding yang eksklusif, institusi dan desa korporatis memiliki social bridging inklusif yang melampaui batas-batas agama, suku dan kerabat. Namun ketiga institusi/desa ini tetap eksklusif secara vertikal, yakni melakukan eksklusi terhadap kaum perempuan, miskin dan kaum marginal lainnya. Ketiganya juga miskin jaringan social yang berorientasi keluar (*outward looking*).

*Keempat*, institusi dan desa sipil yang dibangun oleh kemandirian dan emansipasi warga secara kolektif. Dalam institusi atau desa ini, pengaruh adat, kekerabatan, agama dan birokrasi semakin melemah, digantikan oleh pengaruh universalisme, namun tetap memberikan rekognisi terhadap kearifan lokal. Gerakan perempuan peduli desa, *community center*, koperasi, serikat tani, dan lain-lain termasuk dalam kategori institusi sipil. Mereka inklusif, yang memiliki *social bridging*, sekaligus juga merintis jaringan sosial yang lebih luas dan gerakan sosial. Mereka mengutamakan nilai-nilai seperti kebebasan, kesetaraan, otonomi, demokrasi, partisipasi dan lain-lain.

Dari paparan teoritis di atas, analisa tentang bagaimanakah bentuk modal sosial yang berkembang di tengah masyarakat desa di Kabupaten Barito Kuala menjadi penting untuk dilakukan sebagai dasar pembuatan model pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka membangun desa yang mandiri baik secara ekonomi maupun politik.

## Modal Sosial : Tingkat dan Komponennya





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan dan Fokus Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian kualitatif sehingga diharapkan mampu menggambarkan secara utuh atas subyek penelitian. Fokus penelitian adalah menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan memenuhi tujuan penelitinya. Beberapa pertimbangan lain, seperti diuraikan Vredenberg (1999) yang mendasari penggunaan pendekatan kualitatif dalam suatu penelitian, antara lain : (1) penelitian kualitatif menyajikan bentuk yang menyeluruh (*holistic*) dalam menganalisis suatu fenomena; (2) penelitian jenis ini lebih peka menangkap informasi kualitatif deskriptif, dengan cara relatif tetap berusaha mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari obyek, yang berarti bahwa data yang dikumpulkan dipelajari sebagai keseluruhan yang terintegrasi.

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu terhadap perangkat daerah yang secara langsung terkait dengan implementasi kebijakan yaitu implementasi peraturan menteri desa nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 Dalam Upaya Penurunan Angka Kemiskinan Pedesaan.

#### **3.3. Sumber Data**

Untuk menjawab permasalahan dan memenuhi fokus penelitian, maka data yang dikumpulkan pada penelitian ini bersumber dari :

### 3.3.1. Informan.

Informan kunci adalah Sekretaris Daerah, atau Asisten bidang hukum dan kemasyarakatan, asisten bidang pembangunan, unsur pimpinan SKPD berasal dari Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Camat dan Kepala Desa terpilih sesuai dengan desa-desa yang telah ditetapkan sebagai sample penelitian.

### 3.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dengan berpedoman pada kerangka konseptual di atas, studi dilakukan dengan mengkaji realitas di lapangan. Untuk memperoleh hasil kajian yang rekomendatif, penelitian ini dilakukan dengan cara menggali data-data riil yang mengungkap permasalahan-permasalahan di seputar pemberdayaan masyarakat desa, pemetaan modal sosial dan modal ekonomi desa melalui peta potensi dan kapasitas desa, dinamika permasalahan program pemberdayaan masyarakat desa yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dan pada akhirnya memberikan alternatif model pemberdayaan yang sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat desa di Kabupaten Barito Kuala.

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, proses pengumpulan data dilakukan melalui dua metode penelitian, yaitu *desk study* dan *field study*. Pada tahap pertama (*desk study*), penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder mengenai kebijakan pemberdayaan masyarakat desa, struktur pemerintahan desa, kondisi geografi dan topografi desa, karakteristik sosial dan budaya masyarakat desa, potensi ekonomi desa, pelebagaan lokal berbasis desa

dan berbagai data lainnya yang terkait dengan pelebagaan modal sosial dan ekonomi desa.

Sedangkan pada tahap kedua (*field study*), dilakukan wawancara yang mendalam (*indept interview*) dengan para narasumber yang ada di lokasi penelitian. Selain itu, metode pengumpulan data yang lain, yaitu FGD (*Focus Group Discussion*) dengan beberapa narasumber yang dianggap memiliki kapasitas untuk membicarakan permasalahan pemberdayaan desa dalam menciptakan desa mandiri menurut UU No.6 Tahun 2014 dan pemetaan kapasitas dan potensi desa melalui pelebagaan modal sosial dan modal ekonomi masyarakat desa. Diantaranya adalah aparatur desa, para pemangku agama/alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perempuan, para *stakeholders* yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya desa. Pengamatan langsung dilapangan juga dilakukan oleh tim peneliti sehingga memungkinkan peneliti untuk dapat mengamati dan menelaah organisasi, hubungan antar kelompok atau individu, dan perubahan sosial yang terjadi secara langsung.

Penelitian ini akan mencoba mengaplikasikan transformasi model pemberdayaan masyarakat dari *community driven development* (CDD) menjadi *village driven development* (VDD). Selama ini implementasi program pemberdayaan masyarakat berbasis CDD bersifat struktural dan sentralistik dalam skala proyek-proyek yang diberikan oleh pemerintah pusat. Proyek seperti PNPM Mandiri Perdesaan yang berbasis CDD diberikan kepada masyarakat desa dengan tujuan agar mereka dapat mengelola secara mandiri perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pembangunan desa beserta pendayahgunaan hasil keterlibatan dan partisipasi masyarakat desa melalui CDD.

### 3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penelaahan, pengurutan dan pengelompokan data dengan tujuan untuk menyusun hipotesis kerja dan mengangkatnya menjadi kesimpulan atau teori sebagai temuan penelitian. Data dalam penelitian kualitatif terdiri atas deskripsi rinci tentang situasi, interaksi, peristiwa, orang dan perilaku yang diamati, atau nukilan-nukilan langsung dari seseorang tentang pengalaman, pikiran, sikap dan keyakinannya atau petikan-petikan dokumen dan rekaman lainnya (Bafadal, 1995). *Collect*, yaitu mengumpulkan rangkaian hal-hal yang menarik dari data yang sudah dikumpulkan. Data diidentifikasi, *sorting* dan *difting* ke dalam rangkaian atau pasangan kelompok berdasarkan kategorinya. Kegiatan ini sama dengan kegiatan penyajian data pada Miles dan Huberman.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM WILAYAH

Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Desa ini dilakukan di Barito Kuala, sebuah kabupaten yang terletak paling barat dari tiga belas kabupaten/kota yang ada di Propinsi Kalimantan Selatan. Dengan luas wilayah mencapai 2.996.96 km<sup>2</sup>, penduduk di wilayah ini tersebar ke 17 kecamatan yang membentang mengikuti aliran sungai Barito, yaitu dari arah selatan sebagai muara sungainya (Kecamatan Tabunganen) hingga ke arah utara (Kecamatan Kuripan). Selain sungai Barito, kabupaten ini juga dilalui oleh aliran sungai Kapuas, yang mana kedua sungai tersebut dapat saling terhubung oleh keberadaan 3 buah terusan (anjir) buatan, yaitu Anjir Talaran, Anjir Serapat dan Anjir Tamban. Keberadaan sungai di kabupaten Barito Kuala tentu saja mempengaruhi pola kehidupan masyarakat baik secara geografis, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan di 8 kecamatan dengan proses pemilihan sampel berdasarkan keberagaman letak geografis kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten Barito Kuala. Sebelum menjelaskan kondisi umum kecamatan-kecamatan yang menjadi lokasi penelitian, bab ini terlebih dahulu akan menjelaskan kondisi geografis, sosial dan ekonomi Kabupaten Barito Kuala untuk memberi pengetahuan umum sebagai dasar melakukan analisa terhadap potensi, peluang dan permasalahan yang terkait dengan program pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten Barito Kuala.

#### 4.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Barito Kuala

##### 1. Kondisi Geografis

Seperti yang telah disampaikan di atas, wilayah kabupaten Barito Kuala ini memiliki luas wilayah 2.996.96 km persegi yang tersebar ke dalam 17 buah kecamatan dengan persebaran luas wilayah kecamatan yang relatif beragam. Ada wilayah yang sangat luas seperti kecamatan Kuripan, Bakumpai, Rantau Badauh dan Tabunganen yang persentasenya kontribusi luasnya di atas 7%, namun ada pula yang luas wilayahnya sangat kecil seperti kecamatan Belawan dan Wanaraya dengan persentase kontribusinya hanya kurang dari 3% (lihat tabel).

**Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala menurut Kecamatan, 2016**

	<b>Kecamatan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase (%)</b>
	(1)	(2)	(3)
1	Tabunganen	240.00	8.01
2	Tamban	164.30	5.48
3	Mekarsari	143.50	4.79
4	Anjir Pasar	126.00	4.20
5	Anjir Muara	116.75	3.90
6	Alalak	107.35	3.58
7	Mandastana	136.00	4.54
8	Jejangkit	203.00	6.77
9	Belawang	80.25	2.68
10	Wanaraya	37.50	1.25
11	Barambai	183.00	6.11
12	Rantau Badauh	261.81	8.74
13	Cerbon	206.00	6.87
14	Bakumpai	261.00	8.71
15	Marabahan	221.00	7.37
16	Tabukan	166.00	5.54
17	Kuripan	343.50	11.46
	<b>Barito Kuala</b>	<b>2.996.96</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Kabupaten Barito Kuala dalam Angka, BPS, 2017

Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Barito Kuala berbatasan langsung dengan Kabupaten Hulu Sungai utara dan Tapin di sebelah Utara, di sebelah selatan dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan kabupaten Banjar dan sebelah barat dengan Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah.

Selain Sungai Barito dan Kapuas, kabupaten ini juga dialiri sungai Negara, sungai Alalak, sungai Puntik, Saluran Drainase Tamban, saluran drainase Tabukan dan saluran drainase Tabunganen. Sungai-sungai ini selain menjadi bagian dari transportasi air, mereka juga digunakan untuk pengairan sawah.

## **2. Struktur Ekonomi**

Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi ekonomi di sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Bahkan sektor ini menjadi sektor unggulan kabupaten karena nilainya yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Barito Kuala yang dibuat BPS diketahui bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi merupakan sektor lainnya yang berpotensi untuk berkembang meski nilainya masih berada jauh di bawah sektor pertanian. Dengan menganalisa data PDRB kita dapat mengetahui kemampuan ekonomi suatu daerah. Berikut data PDRB Kabupaten Barito Kuala tahun 2010-2016.

**Tabel 2. PDRB Kabupaten Barito Kuala Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (2012-2016)**

Lapangan Usaha 2010	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.424.192.65	1.462.313.54	1.581.196.10	1.775.834.20	1.945.141.10
Pertambangan dan Penggalian	3.771.66	4.148.82	4.749.47	5.605.30	6.052.40
Industri Pengolahan	837.238.99	904.731.94	1.001.855.75	1.100.853.60	1.192.978.70
Pengadaan Listrik dan Gas	2.368.75	2.447.54	3.261.54	5.078.90	6.496
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.346.14	12.063.29	14.092.63	15.651.60	17.436.90
Konstruksi	563.074.31	616.887.27	716.039.32	825.152.20	905.650.40
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	470.562	528.526.45	616.132.63	709.000.70	790.365.60
Transportasi dan Pergudangan	161.697.45	175.577.17	200.583.20	222.531.20	239.345.90
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	101.989.47	113.682.41	134.751.20	152.774.30	165.301
Informasi dan Komunikasi	90.120.43	94.881.87	108.270.54	119.535.50	132.845.50
Jasa Keuangan dan Asuransi	75.565.26	90.638.07	104.078.04	111.408.10	125.250.80
Real Estate	142.010.61	158.183.43	185.498.69	208.903.10	231.723.80
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	342.525.85	396.090.66	445.228.66	529.604.70	377.263.80
Jasa Pendidikan	216.087.61	244.509.23	282.146.27	329.676.70	377.263.80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53.022.98	59.957.28	69.042.55	80.739.40	90.784.50
Jasa Lainnya	32.208.31	34.695	41.349.05	48.432.60	54.246.50
<b>PDRB</b>	<b>4.534.367.70</b>	<b>4.906.628.66</b>	<b>5.516.862.80</b>	<b>6.250.385.20</b>	<b>6.845.708.39</b>

Sumber : <https://baritokuala.bps.go.id>



Sektor pertanian juga merupakan bagian dari strategi pembangunan Kabupaten Barito Kuala dalam upaya mencapai kemampuan berketahanan pangan melalui peningkatan usaha pertanian inovatif yang semakin ke hilir yang diindikasikan melalui bertambahnya luas lahan usaha, ragam diversifikasi, produksi, posisi tawar menawar komoditas yang bernilai tambah. Misi kabupaten ini terdapat didalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Barito Kuala tahun 2012 – 2017.

Selain sektor pertanian tanaman pangan, pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan serta peningkatan produktivitas peternakan yang unggul dan berkualitas juga menjadi strategi lainnya untuk mencapai misi kabupaten Barito Kuala dalam meningkatkan perekonomian berbasis pertanian. Arah kebijakan kabupaten tentu saja tidak hanya melalui revitalisasi aturan-aturan lokal dan pembuatan regulasi pemanfaatan sumberdaya ikan, tetapi juga mengembangkan kawasan ternak melalui ekstensifikasi dan melakukan diversifikasi produk perikanan dan kelautan bagi industri dan perdagangan.

#### **4.2 Gambaran Umum Wilayah Kecamatan**

Secara administratif, kabupaten Barito Kuala memiliki 17 kecamatan dengan 195 desa dan 6 buah kelurahan (lihat tabel). Penelitian ini memilih delapan kecamatan secara *purposive sampling* yang didasarkan pada pertimbangan penyebaran geografis, potensi ekonomi kecamatan dan jumlah penduduk miskin di kecamatan tersebut. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan mengingat tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pola atau model pemberdayaan masyarakat desa yang mampu

memberikan dampak positif dalam mengurangi angka kemiskinan di kabupaten Barito Kuala secara umum.

Melalui diskusi dengan beberapa narasumber terkait, yaitu kepala BPMPD Barito Kuala, dan kepala dan kepala bidang (kabid) Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Barito Kuala maka penelitian ini memilih delapan kecamatan untuk menjadi objek penelitian, yaitu kecamatan Tamban, kecamatan Alalak, kecamatan Jejangkit, kecamatan Kuripan, kecamatan Tabukan, kecamatan Anjir Muara, kecamatan Mandastana, dan kecamatan Rantau Badauh.

**Tabel 3. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016**

	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>Kelurahan</b>
	(1)	(2)	(3)
1	Tabunganen	14	-
2	Tamban	16	-
3	Mekarsari	9	-
4	Anjir Pasar	15	-
5	Anjir Muara	15	-
6	Alalak	15	3
7	Mandastana	14	-
8	Jejangkit	7	-
9	Belawang	13	-
10	Wanaraya	13	-
11	Barambai	11	-
12	Rantau Badauh	9	-
13	Cerbon	8	-
14	Bakumpai	8	1
15	Marabahan	8	2
16	Tabukan	11	-
17	Kuripan	9	-
	<b>Barito Kuala</b>	<b>195</b>	<b>6</b>

Sumber : Kabupaten Barito Kuala dalam Angka, BPS, 2017

Pemilihan delapan kecamatan ini ditentukan oleh letak desa yang dijadikan sebagai lokasi penelitian dengan mempertimbangkan persebaran letak geografis wilayah, basis potensi kecamatan, hasil analisis klasifikasi, kategori dan tipologi desa-desa yang ada di kecamatan, dan data jumlah penduduk miskin di kabupaten Barito Kuala.

### **1. Kondisi Geografis, Potensi Ekonomi dan Sosial Kecamatan Tamban**

Secara geografis kecamatan Tamban ini berbatasan langsung di sebelah utara dengan kecamatan Anjir Muara dan Mekarsari, di sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Tabunganen, sebelah timur berbatasan dengan Kota Banjarmasin, Alalak dan Sungai Barito sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Mekarsari dan Kabupaten Kapuas (Kalimantan Tengah). Dengan luas wilayah hanya mencapai 164,30 km<sup>2</sup>, wilayah Tamban ini terbagi ke dalam 16 buah desa dengan persebaran luas wilayah yang hampir merata di beberapa desa (lihat tabel).

Meskipun dengan luas wilayah yang terbatas, kecamatan Tamban memiliki jumlah penduduk tertinggi kedua setelah kecamatan Alalak di wilayah Barito Kuala yaitu mencapai 32.801 jiwa yang terdiri atas laki-laki 16.548 jiwa dan perempuan 16.253 jiwa pada tahun 2016. Jumlah ini meningkat menjadi 33.137 jiwa pada tahun 2017. Akibatnya, angka kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> mencapai 202 jiwa pada tahun 2017 dan menjadikan kecamatan tersebut terpadat ketiga setelah Alalak dan Wanaraya.

Jika dianalisa lebih lanjut, komposisi penduduk berusia produktif (25 – 54 tahun) cukup besar, yaitu sekitar 15.393 atau kurang lebih 46 persen dari jumlah penduduk

kecamatan Tamban. Tentu saja sumber daya manusia yang mencukupi memberikan kontribusi yang positif dalam perspektif pembangunan ekonomi.

Dilihat dari struktur sosial budayanya, masyarakat yang tinggal di kecamatan Tamban kebanyakan berasal dari suku Jawa yang disebut sebagai Jawa Tamban.

**Tabel 4. Jumlah Desa dan Penduduk di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017**

	<b>Desa</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>	<b>Rata-Rata Penduduk (jiwa/km<sup>2</sup>)</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Purwosari II	9.00	1.288	143.11
2	Purwosari I	15.75	2.136	135.62
3	Tamban Bangun	3.40	1.883	553.82
4	Tamban Muara	20.00	1.467	73.35
5	Tamban Kecil	5.40	2.383	441.30
6	Tinggiran II	11.00	4.684	425.82
7	Jelapat I	18.00	6.274	348.56
8	Tamban Muara Baru	15.00	1.745	116.33
9	Purwosari Baru	8.50	2.298	270.35
10	Sekata Baru	8.00	1.433	168.59
11	Koanda	8.50	954	119.25
12	Damsari	8.50	977	114.94
13	Sidorejo	5.25	1.343	255.81
14	Jelapat Baru	18.00	2.438	135.44
15	Tamban Bangun Baru	3.50	934	266.86
16	Tamban Sari Baru	6.50	900	138.46
	Jumlah	164.30	33.137	201.69

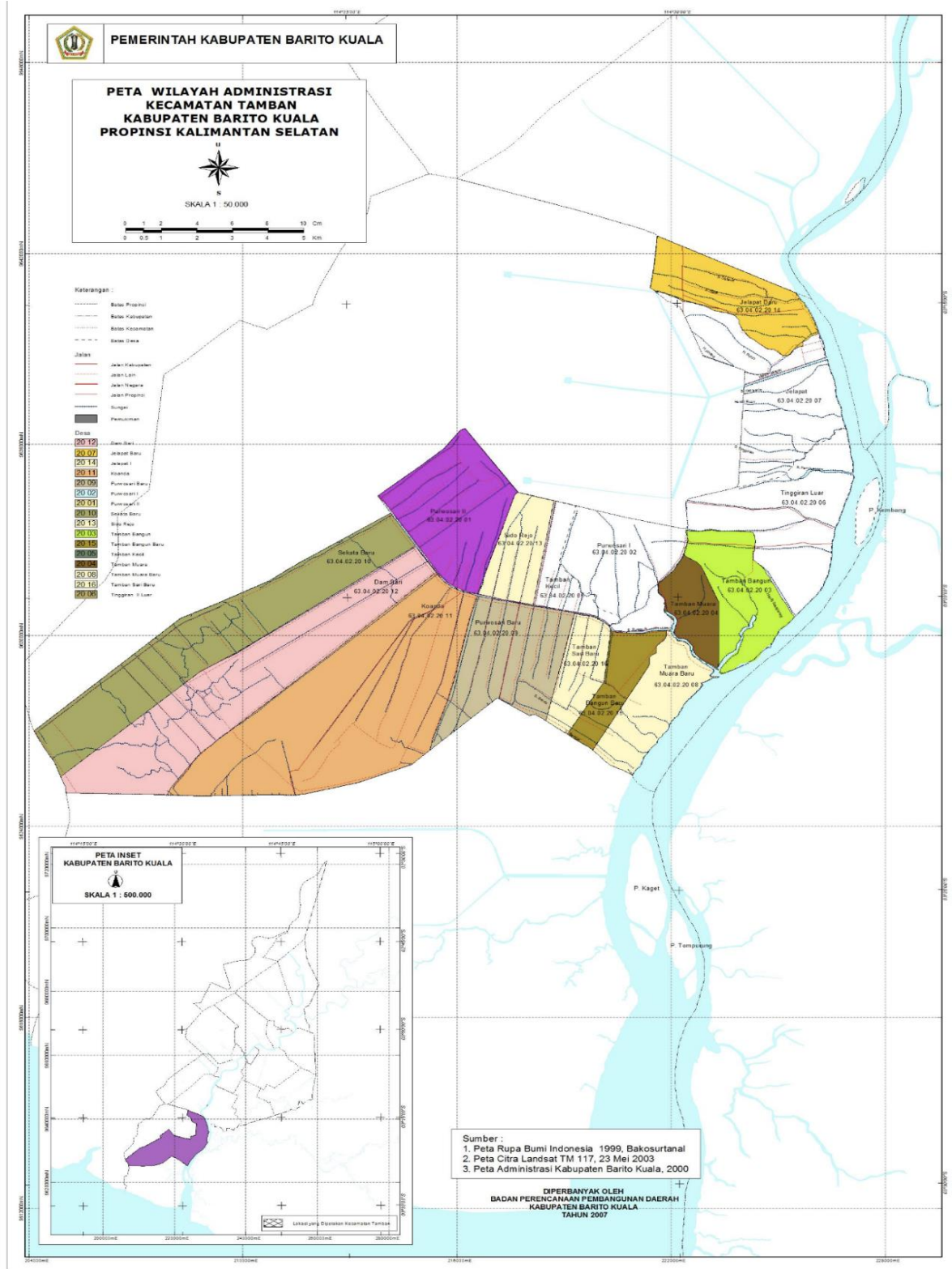
Sumber : Kecamatan dalam Angka, BPS, 2017

Secara historis, hal ini disebabkan pada masa penjajahan Belanda tepatnya pada tahun 1937 wilayah ini menjadi salah satu tujuan program transmigrasi dari pulau Jawa

ke pulau Kalimantan yang berbasis pada pengembangan lahan gambut untuk pertanian. Keberadaan dua buah kanal/anjir, yaitu kanal Tamban dan kanal Jelapat yang menghubungkan Sungai Kapuas Murung dengan Sungai Barito di kecamatan Tamban ini menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan bagian dari pengembangan lahan gambut secara besar-besaran pada tahun 1969 – 1970 yang dikenal dengan proyek pembukaan persawahan pasang surut (P4S).

Sejak masa Orde Baru, kecamatan ini memang diperuntukkan untuk pengembangan industri pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan luasnya wilayah yang diperuntukkan untuk areal persawahan, yaitu 281 hektar (irigasi) dan 8.370 hektar (non irigasi). Sehingga total lahan sawah yang dimiliki kecamatan ini adalah 8.651 hektar. Meskipun areal pertanian yang dimanfaatkan untuk tanaman padi tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan kecamatan Rantau Badauh (17.657 hektar), namun produktivitas padi sawah dan padi ladang tersebut mampu mencapai 26.080 ton pada tahun 2016 dan mengalami peningkatan menjadi 29.465 ton pada tahun 2017. Hasil ini tidak terlalu berbeda dengan produktivitas padi di kecamatan Rantau Badauh yang hanya mencapai 29.359 ton.

Sedangkan sektor pertanian untuk tanaman selain padi seperti buah jeruk, mangga, jambu biji, nangka, nanas, dan pisang masih rendah jika dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya. Hanya budidaya buah jeruk saja yang cukup menghasilkan, yaitu sekitar 610 ton pada tahun 2017. Namun, jika dibandingkan dengan kecamatan Barambai dan Mandasatana yang masing-masing mampu menghasilkan 19.010 ton dan 28.332 ton, produksi jeruk di kecamatan Tamban ini masih dipandang rendah.



Untuk sektor tanaman perkebunan, kecamatan ini memiliki potensi yang besar dalam pengembangan produksi kelapa dalam. Pada tahun 2016, Tamban mampu menghasilkan 2.500 ton kelapa, jumlah ini merupakan produksi terbesar kedua setelah kecamatan Mekarsari yang mampu menghasilkan 2.825 ton. Pada tahun 2017, produksi kelapa di kecamatan Tamban mengalami peningkatan yaitu mencapai 2.911 ton. Padahal, luas areal lahan produksi kelapa dalam mengalami penurunan dari 2.910 hektar menjadi hanya seluas 1.206 hektar.

Di sektor peternakan, kecamatan Tamban juga memiliki populasi unggas berupa ayam kampung 46.757 ekor, ayam pedaging 11.413 ekor dan itik 6.891 ekor pada tahun 2016. Peningkatan jumlah ayam kampung cukup signifikan pada tahun 2017, yaitu 93.22 ekor. Sedangkan jumlah populasi itik menurun menjadi hanya 6.675 ekor. Peningkatan populasi unggas di wilayah ini masih perlu mendapatkan perhatian mengingat jumlah sumber daya manusia yang cukup besar yang berpotensi untuk peningkatan produksi dan konsumsi. Bahkan jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya, jumlah produksi unggas di Tamban masih relatif kecil.

Di sektor perikanan, jumlah rumah tangga yang terlibat dalam perikanan tangkap di perairan umum adalah sebesar 163 buah dan kolam sejumlah 101 buah dengan luas wilayah perikanan budidayanya hanya 2,5 hektar. Meskipun demikian, produksi perikanan budidaya kolam ini mampu menghasilkan 146.5 ton ikan dengan nilai 2.057 juta rupiah. Artinya, efektivitas pengembangan budidaya di sektor perikanan cukup tinggi. Sayangnya, pada tahun 2017 produksi di wilayah ini mengalami penurunan lebih dari 50%, yaitu hanya 57,60 ton. Penurunan ini tidak hanya terjadi di kecamatan

Tamban, namun juga dialami kecamatan-kecamatan lainnya yang sebelumnya mampu menghasilkan produksi perikanan budidaya di atas nilai 2 juta rupiah, seperti Mekarsari, Tabunganen, dan Alalak. Di sektor industri, kecamatan Tamban memiliki 412 perusahaan dengan nilai investasi 50.404.000 rupiah dan menyerap 816 orang tenaga kerja.

Kecamatan Tamban memiliki jalan kabupaten terpanjang di kabupaten Barito Kuala, yaitu 69.510 km yang terdiri atas jalan beraspal sepanjang 21.575 km, kerikil 35.885 km dan tanah sepanjang 12.050 km. Sayangnya, mayoritas kondisi jalan tersebut dalam kondisi rusak (31.885 km), sedangkan jalan dalam kondisi baik dan sedang masing-masing hanya sepanjang 15.525 km dan 22.100 km.

Dilihat dari struktur sosial budayanya, masyarakat yang tinggal di kecamatan Tamban kebanyakan berasal dari suku Jawa yang disebut sebagai Jawa Tamban. Secara historis, hal ini disebabkan pada masa penjajahan Belanda tepatnya pada tahun 1937 wilayah ini menjadi salah satu tujuan program transmigrasi dari pulau Jawa ke pulau Kalimantan yang berbasis pada pengembangan lahan gambut untuk pertanian. Keberadaan dua buah kanal/anjir, yaitu kanal Tamban dan kanal Jelapat yang menghubungkan Sungai Kapuas Murung dengan Sungai Barito di kecamatan Tamban ini menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan bagian dari pengembangan lahan gambut secara besar-besaran pada tahun 1969 – 1970 yang dikenal dengan proyek pembukaan persawahan pasang surut (P4S).



## 2. Kecamatan Jejangkit

Secara geografis, kecamatan Jejangkit terletak di wilayah bagian timur ibukota kabupaten Barito Kuala dan berbatasan dengan Kecamatan Mandastana (sebelah barat), Kecamatan Wanaraya (sebelah utara), dan Kecamatan Cirebon (sebelah utara). Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 203 km<sup>2</sup> (lihat tabel ) yang melingkupi 7 buah desa. Jika dibandingkan dengan 16 kecamatan lainnya di kabupaten Barito Kuala, luas wilayah Jejangkit termasuk dalam 7 besar kecamatan yang paling luas selain kecamatan Kuripan (343.50 km<sup>2</sup>), Cerbon (206 km<sup>2</sup>), Bakumpai (261 km<sup>2</sup>), Tabunganen (240 km<sup>2</sup>), Rantau Badauh (261,81 km<sup>2</sup>), dan Marabahan (221 km<sup>2</sup>).

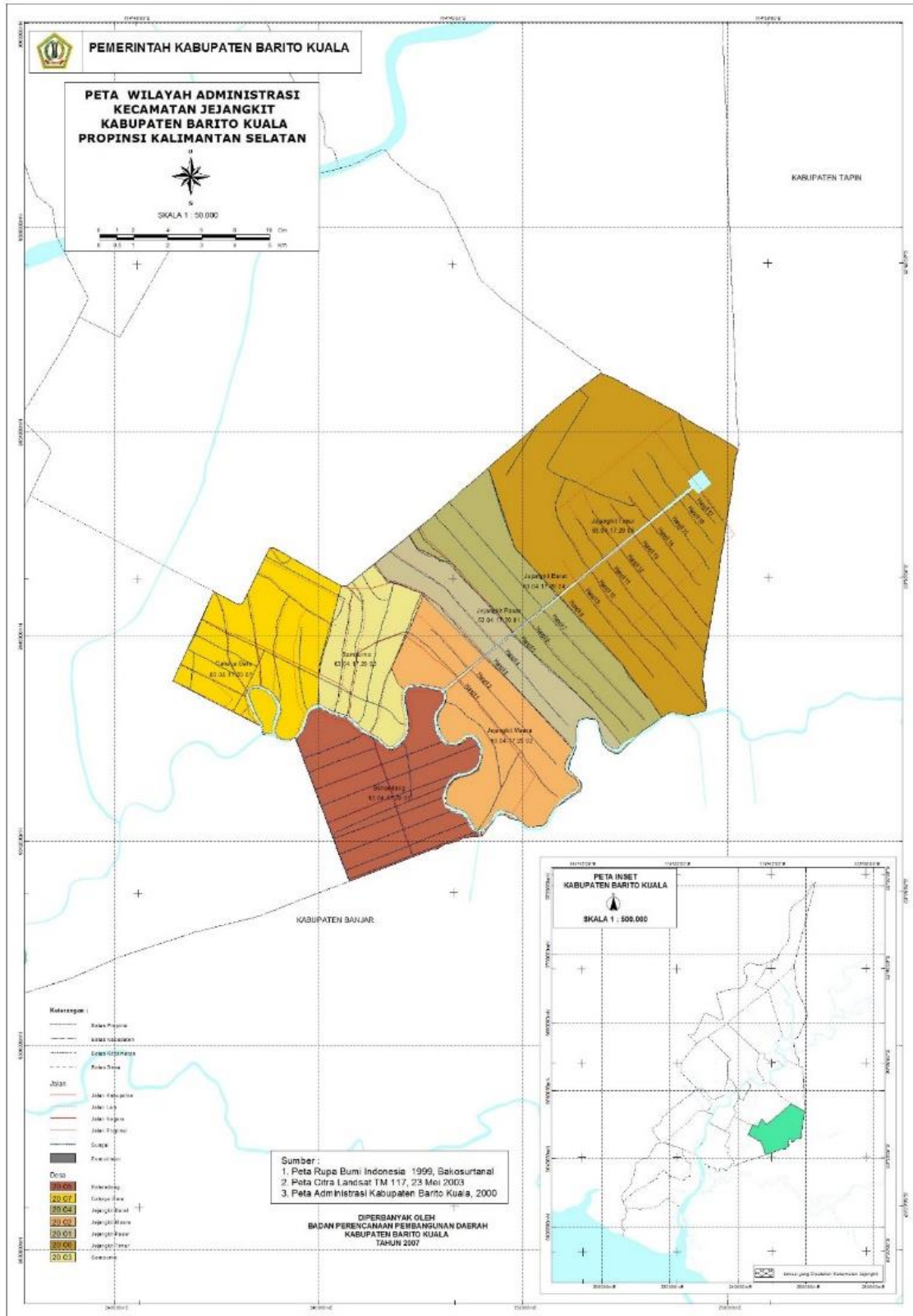
Dengan wilayah yang cukup luas, kecamatan Jejangkit hanya memiliki jumlah penduduk berkisar 6.745 jiwa yang terdiri atas laki-laki 3.467 jiwa dan perempuan 3.278 jiwa. Artinya, angka kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> hanya berkisar 32,73. Keadaan serupa juga bisa kita amati di kecamatan Kuripan yang jumlah penduduknya berkisar 5.766 jiwa, Bakumpai dengan 10.250 jiwa dan kecamatan Cerbon dengan jumlah penduduk 9.168 jiwa. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki angka kepadatan penduduk berturut-turut sebesar 16,79 km<sup>2</sup>, 39,27 km<sup>2</sup> dan 44,50 km<sup>2</sup>.

**Tabel 5. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Jejangkit**

	<b>Desa</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase</b>
	(1)	(2)	(3)
1	Cahaya Baru	10.00	4,93
2	Sampurna	15.00	7,39
3	Bahandang	18.00	8,87
4	Jejangkit Muara	12.00	5,91
5	Jejangkit Pasar	12.00	5,91
6	Jejangkit Barat	16.00	7,88
7	Jejangkit Timur	120.00	59,11
	Jumlah	203.00	100

Sumber : Kecamatan dalam Angka, BPS, 2017

Berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten Barito Kuala, kecamatan Jejangkit diperuntukkan untuk menjadi salah satu Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dari 11 kecamatan yang ada di kabupaten, yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Secara spesifik, PPK kecamatan Mandastana, Kuripan, Bakumpai, Barambai, Cerbon, Jejangkit dan Mekarsari memiliki fungsi pelayanan; pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya, pusat pengembangan komoditas hasil pertanian, dan pusat pengembangan fasilitas pendidikan.



Struktur ekonomi masyarakat yang tinggal di kecamatan Jejangkit mayoritas adalah bidang pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan luasnya wilayah yang diperuntukkan untuk areal persawahan, yaitu 2.646 hektar (irigasi) dan 11.712 hektar (non irigasi). Sehingga total lahan sawah yang dimiliki kecamatan ini adalah 14.358 hektar. Berdasarkan luasnya wilayah pertanian, kecamatan Jejangkit merupakan kecamatan terbesar kedua di kabupaten Barito Kuala setelah Rantau Badauh dengan luas areal sawah 17.657 hektar.

Sayangnya, sektor pertanian untuk tanaman selain padi seperti buah-buahan dan sayur mayur seperti cabai, terong, tomat, alpukat, durian, dan semangka masih sangat rendah jika dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya. Hanya budidaya buah jeruk saja yang cukup menghasilkan, yaitu sekitar 14.642 pohon. Namun, jika dibandingkan dengan kecamatan Marabahan yang mampu menghasilkan 42.506 pohon, produksi jeruk di kecamatan Jejangkit masih rendah.

### **3. Kecamatan Kuripan**

Secara geografis kecamatan Kuripan terletak paling ujung utara kabupaten Barito Kuala. Di sebelah selatan wilayahnya berbatasan dengan kecamatan Bakumpai, sebelah utara dengan kecamatan Paminggir, sebelah timur dengan Kabupaten Tapin dan sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah. Kuripan juga merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling besar di kabupaten Barito Kuala yaitu sebesar 343.50 km<sup>2</sup> (lihat tabel 6).

**Tabel 6. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Kuripan**

	<b>Desa</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase</b>
	(1)	(2)	(3)
1	Jambu Baru	84.00	24.45
2	Jambu	36.00	10.48
3	Kabuau	24.00	6.99
4	Asia Baru	24.00	6.99
5	Jarenang	25.00	7.28
6	Kuripan	22.50	6.25
7	Rimbun Tulang	22.50	6.25
8	Tabatan	35.00	10.19
9	Tabatan Baru	70.50	20.52
	Jumlah	343.50	100.00

Sumber : Kecamatan dalam Angka, BPS, 2017

Dengan wilayah yang sangat luas, kecamatan Kuripan hanya memiliki jumlah penduduk berkisar 5.844 jiwa yang terdiri atas laki-laki 2.906 jiwa dan perempuan 2.938 jiwa. Penduduk tersebut bertempat tinggal tersebar ke sembilan desa dengan tingkat persebaran penduduk yang relatif merata (lihat tabel). Oleh karena itu, kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu sebesar 17 jiwa/km<sup>2</sup>.



**Tabel 7. Rata-Rata Penduduk Per Desa di Kecamatan Kuripan, 2017**

	<b>Desa</b>	<b>Luas Wilayah (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>	<b>Rata-Rata Penduduk (jiwa/km<sup>2</sup>)</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jambu Baru	84.00	580	6.90
2	Jambu	36.00	529	14.69
3	Kabuau	24.00	585	24.038
4	Asia Baru	24.00	539	22.46
5	Jarenang	25.00	480	19.20
6	Kuripan	22.50	630	28.00
7	Rimbun Tulang	22.50	694	30.84
8	Tabatan	35.00	839	23.89
9	Tabatan Baru	70.50	973	13.80

Sumber : Kecamatan dalam Angka, BPS, 2017

Kecamatan Kuripan mempunyai posisi yang strategis karena wilayahnya dilintasi oleh sungai utama yaitu sungai Barito yang terhubung dengan sungai Kapuas melalui desa Muara Kecamatan Tabukan. Sungai Barito yang mengarah ke utara dengan cabang anak sungai yang menembus ke Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan anak muara berada di kecamatan Paminggir Kabupaten HSU menyebabkan kecamatan Kuripan ini memiliki potensi menjadi jalur utama transportasi air ke wilayah HSU dan HSS.

Berdasarkan kebijakan kabupaten Barito Kuala yang terdapat dalam Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 – 2031, kecamatan Kuripan ini diperuntukkan untuk mengembangkan kawasan perikanan budidaya, yaitu perikanan kolam, perikanan jaring apung dan perikanan minapadi. Selain itu kecamatan ini juga termasuk kawasan peruntukan pengolahan industri ikan,

berupa komoditi kerupuk ikan, amplang, ikan kering dan abon ikan bersama dengan kecamatan Bakumpai, kecamatan Tabunganen dan kecamatan Marabahan.

Pada tahun 2017, kecamatan Kuripan hanya mampu memproduksi perikanan kolam sebesar 5,90 ton dengan nilai 148 juta rupiah dan perikanan jaring apung sebesar 12,17 ton dengan nilai 3.210.120 milyar rupiah. Jumlah produksi perikanan kolam di kecamatan ini masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi yang dihasilkan oleh kecamatan Alalak, Tamban dan Mekarsari. Yang menarik adalah meskipun jumlah produksi perikanan jaring apung kecamatan Tamban masih berada di bawah kecamatan Marabahan, namun nilai produksinya jauh lebih besar mencapai lebih dari 10 kali lipat nilai produksi jaring apung kecamatan Marabahan yang hanya 208 juta. Budidaya perikanan ikan kolam ini melibatkan delapan kelompok tani dengan jumlah 82 orang. Tentu saja jumlah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang budidaya perikanan masih berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

Di sektor pertanian, kecamatan Kuripan memiliki potensi daerah untuk pengembangan perkebunan dengan komoditas utama kelapa sawit, karet, purun, dan kelapa dalam. Pada tahun 2017, kecamatan ini menghasilkan 200 ton kelapa sawit, 4 ton karet dan 320 ton purun. Dari tiga jenis perkebunan tersebut, kecamatan Kuripan memiliki potensi besar pada produksi purun karena menjadi produsen utama kedua setelah kecamatan Bakumpai. Wilayah ini juga menjadi produsen ayam kampung dan itik. Sayangnya, tingkat populasi unggas tersebut masih paling rendah jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya karena seluruh kecamatan di Barito Kuala merupakan wilayah produsen ayam kampung dan itik.



Di sektor peternakan, kecamatan Kuripan ini menjadi satu-satunya sentra wilayah pengembangan budidaya kerbau rawa dengan populasi mencapai 1.572 ekor pada tahun 2017. Keberadaan peternakan kerbau kalang memiliki potensi besar pula untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata alam dengan daya tarik kerbau dan rawa. Seperti yang dilakukan oleh Propinsi Sumatera Selatan di Kecamatan Pampangan, Ogan Komering Ilir yang memanfaatkan keberadaan lahan peternakan yang mencapai 1.200 hektar dan jumlah kerbau rawa mencapai 5.000 ekor. Hal yang sama juga dulu pernah dilakukan oleh Kabupaten HSU melalui lomba kerbau rawa yang menyerupai atraksi karapan sapi di Madura di wilayah Danau Panggang. Sayangnya, potensi pariwisata ini mengalami kemunduran karena lahan rawa yang semakin berkurang akibat alih fungsi lahan.

Kecamatan Kuripan secara strategis juga menjadi bagian dari pengembangan kawasan strategis propinsi dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yang disebut sebagai Kawasan potensial Batang Banyu bersama dengan kecamatan Belawang, kecamatan Barambai, Cerbon, Wanaraya, Bakumpai, dan Tabukan karena bercirikan kawasan rawa. Pembangunan di sektor pariwisata ini tentu saja harus mendapatkan dukungan infrastruktur yang memadai. Kondisi jalan kabupaten masih perlu diperbaiki di wilayah ini karena mengalami rusak berat sepanjang 2,9 km dan keadaan rusak 2,2 km. Dari panjang jalan 27 km, 4,7 km diantaranya masih berupa kerikil dan 5,2 km berupa tanah.

#### 4. Kecamatan Alalak

Kecamatan ini secara topografi berada pada hamparan wilayah yang datar dengan kelerengan 2% dan ketinggian elevasi antara 1 – 3 meter di atas permukaan laut. Kecamatan ini berbatasan langsung di sebelah utara dengan kecamatan Wanaraya dan Belawang, di sebelah selatan dengan Kota Banjarmasin, di sebelah timur dengan kecamatan Mandastana dan di sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Anjir Muara dan Mekarsari. Secara geografis, kecamatan Alalak dilalui oleh Sungai Barito dengan 3 buah terusan (anjir) buatan yang menghubungkan Sungai Barito dan Sungai Kapuas yaitu Anjir Talaran, Anjir Serapat dan Anjir Tamban. Keadaan hidrologi ini sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan lahan di daerah ini maupun di bagian hulu.

Secara administratif, kecamatan Alalak terdiri atas 3 kelurahan dan 15 buah desa. Dengan luas wilayah 107.35 km<sup>2</sup> (lihat tabel), kecamatan Alalak memiliki penduduk mencapai 57.312 jiwa pada tahun 2016 yang terdiri atas laki-laki 28.609 jiwa dan perempuan 28.703 jiwa. Akibatnya, kecamatan Alalak memiliki kepadatan penduduk tertinggi di kabupaten Barito Kuala yaitu sebesar 533.88 jiwa/ km<sup>2</sup>. Pertumbuhan penduduk yang paling besar disumbangkan oleh banyaknya perpindahan penduduk dari kota Banjarmasin dan sekitarnya disebabkan kompetitifnya harga yang ditawarkan oleh pengembang perumahan di kecamatan ini disamping memang menjadi kawasan alternatif yang cukup representatif untuk bisnis dan hunian. Gejala perkembangan pesat tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya pembangunan perumahan di kawasan tersebut.

**Tabel 8. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Alalak**

	<b>Desa</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Jumlah Penduduk (ribuan)</b>
	(1)	(2)	(3)
1	Kelurahan Berangas	6.61	6.19
2	Kelurahan Berangas Barat	6.51	6.09
3	Kelurahan Handil Bakti	8.00	7.49
4	Desa Pulau Alalak	1.21	1.13
5	Desa Pulau Sewangi	0.55	0.51
6	Desa Pulau Sugara	0.56	0.52
7	Desa Sungai Lumbah	7.00	6.55
8	Desa Berangas Timur	4.00	3.74
9	Desa Semangat Bakti	3.50	3.28
10	Desa Sungai Pitung	11.92	11.16
11	Desa Balandean Muara	8.63	8.08
12	Desa Balandean	16.86	15.78
13	Desa Tanjung Harapan	7.00	6.55
14	Desa Semangat Dalam	7.50	7.02
15	Desa Beringin	5.50	5.15
16	Desa Semangat Karya	3.50	3.28
17	Desa Panca Karya	4.50	4.21
18	Desa Tatah Mesjid	8.50	7.96
	Jumlah	107.35	100

Sumber : Kecamatan dalam Angka, BPS, 2017

Letaknya yang cukup strategis dan pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan kecamatan Alalak ini direncanakan untuk menjadi pusat kegiatan lokal (PKL) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Fungsi pelayanan PKL perkotaan Alalak ini diantaranya adalah menjadi pusat pengembangan perdagangan, perbankan dan jasa regional, pusat

pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya, pusat pengembangan industri perkapalan laut, pusat pengembangan industri hasil pertanian, pusat pelayanan lintas kecamatan, pusat pengembangan rumah sakit, sekolah, terminal, stasiun kereta api dan pariwisata alam dan kota.

Ada tiga macam kawasan yang saat ini menjadi bagian pengembangan tata ruang wilayah kecamatan Alalak secara khusus dan kabupaten Barito Kuala secara umum, yaitu:

a. Kawasan Pengembangan Perumahan.

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan kota Banjarmasin, kecamatan Alalak memiliki lahan potensial untuk dijadikan kawasan pemukiman. Didukung dengan pembangunan jalan lingkar utara dan peningkatan fasilitas air bersih, kedepannya diharapkan perkembangan perumahan akan semakin pesat. Perkembangan perumahan di kawasan Handil Bakti sampai saat ini umumnya berada pada lapis kedua jaringan jalan trans Kalimantan dan banyak pemukiman formal yang dikembangkan oleh para pengembang.

b. Kawasan Perdagangan Bisnis Baru

Kawasan Handil Bakti yang merupakan bagian depan dari daerah penyangga (buffer area) ibukota propinsi Kalimantan Selatan dan sekaligus daerah lintas ruas jalan Trans Kalimantan sangat prospektif sebagai kawasan bisnis baru dengan pasar Handil Bakti sebagai pusat perkembangannya. Tumbuhnya usaha perdagangan di sepanjang jalan Trans Kalimantan seperti toko, kios-kios kecil,

warung dan rumah toko/ruko menjadi indikator berkembangnya perdagangan dan jasa di kecamatan Alalak ini.

c. Kawasan industri

Kawasan ini menjadi kawasan industri dan perdagangan berupa industri galangan kapal dan industri kayu. Kawasan perdagangan timbul akibat adanya industri-industri kecil seperti industri roti, industri galangan kapal, kerajinan, las bubut dan lain-lain. Industri yang berkembang masih berskala kecil sehingga belum limbah yang dihasilkan tidak menjadi permasalahan bagi lingkungan sekitar. Di sektor ini kecamatan Alalak merupakan wilayah yang memiliki jumlah industri terbesar di kabupaten Barito Kuala, yaitu sebanyak 1.398 buah dengan angka penyerapan tenaga kerja 2.097 orang. Namun, berdasarkan data BPS, jumlah industri di kecamatan ini mengalami penurunan lebih dari separuhnya, yaitu hanya tersisa 602 industri. Yang menarik adalah angka penyerapan tenaga kerja justru meningkat menjadi 2.109 orang. Berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, kecamatan Alalak diperuntukkan menjadi wilayah pengembangan industri besar bersama dengan Kecamatan Tamban, kecamatan Tabunganen dan Kecamatan Anjir Muara.

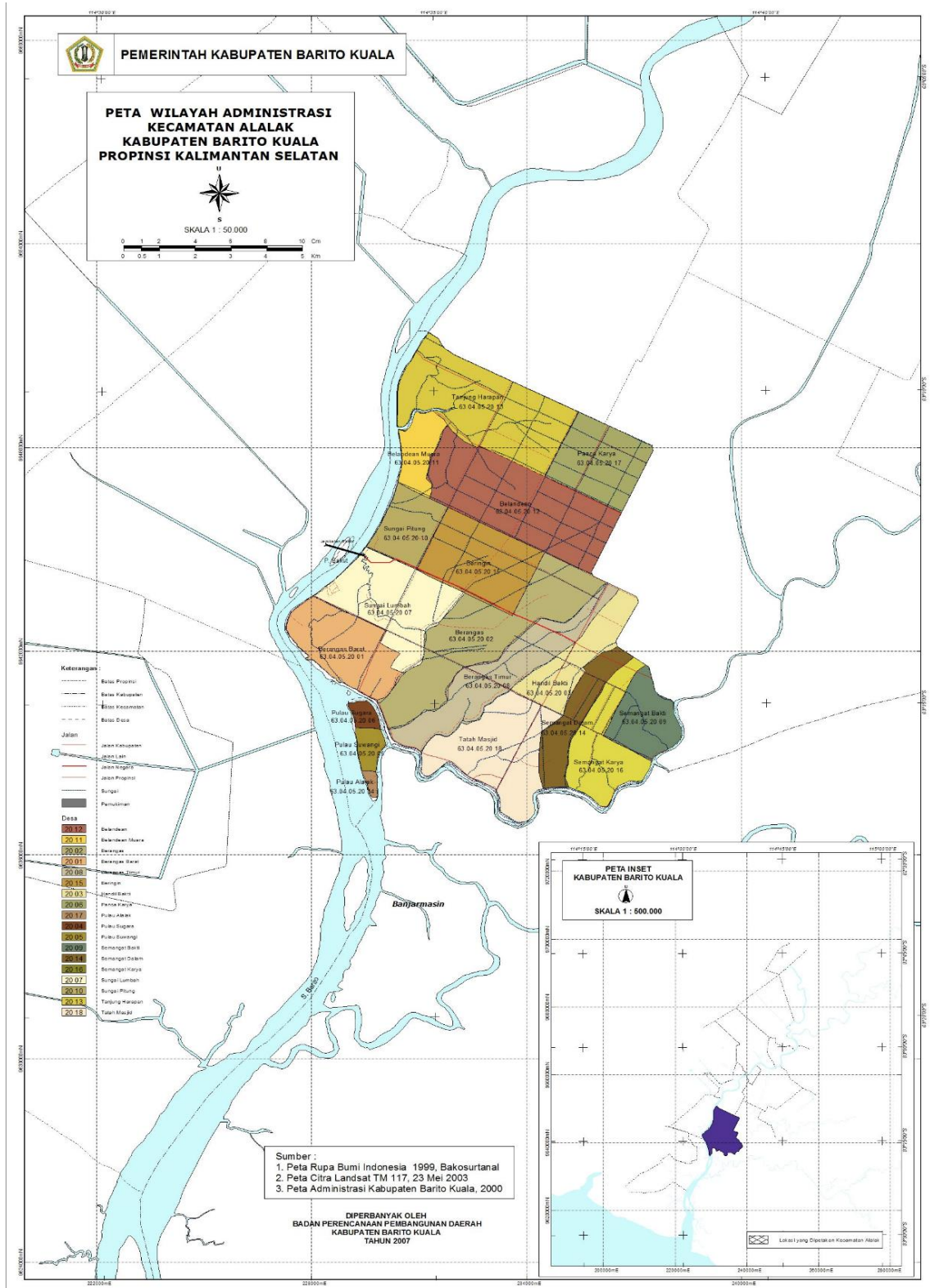
Di sektor pertanian, meskipun bukan merupakan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, namun Kecamatan Alalak ini menjadi salah satu kawasan komoditas unggulan tanaman hortikultura berupa jeruk dan kuini bersama delapan buah kecamatan lainnya seperti kecamatan Belawang, kecamatan Anjir Muara, dan kecamatan Marabahan. Pada tahun 2017, Alalak mampu memproduksi jeruk sebesar

5.643 ton pada tahun 2017 lalu. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan produksi tahun 2016 yang hanya mencapai 3.999 ton.

Di sektor peternakan, kecamatan ini juga dirancang menjadi salah satu pusat kawasan ternak unggas, yaitu ayam ras, ayam buras dan itik. Populasi ayam kampung/buras pada tahun 2017 mencapai 92.003, dan itik sebanyak 5.619. Sedangkan ternak berupa ayam ras masih belum menunjukkan hasil.

Di sektor perikanan, kecamatan Alalak juga termasuk menjadi bagian dari kawasan peruntukan perikanan kolam, perikanan jaring apung dan perikanan minipadi untuk Kabupaten Barito Kuala. Jumlah rumah tangga yang terlibat dalam pengembangan perikanan kolam sangat besar yaitu 215 buah rumah tangga. Jumlah tersebut menjadi jumlah rumah tangga terbesar di Kabupaten Barito Kuala. Hal ini tentu saja berdampak positif terhadap angka produksi ikan kolam yang mencapai 75,61 ton dengan nilai 1,554,40 milyar rupiah dan menjadi wilayah produsen ikan kolam terbesar di tingkat kabupaten. Sayangnya, jika dibandingkan dengan angka produksi pada tahun 2016 yang mampu menghasilkan 192,3 ton ikan kolam dengan nilai 2,7 miliar rupiah, produksi ikan kolam di kecamatan ini mengalami penurunan cukup drastis.

Kecamatan Alalak juga dirancang untuk menjadi destinasi wisata alam dengan adanya pulau kembang dan pulau Bakut, wisata buatan dengan adanya jembatan barito (daya tarik pemandangan sungai Barito dan Pulau Bakut) dan wisata kota Alalak (daya tarik water boom dan pusat perbelanjaan) dan wisata budaya (religi) dengan adanya makan Datu Aminin dan Datu Kayan.



Sektor-sektor yang dijelaskan tersebut di atas cukup berpotensi untuk berkembang di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu kecamatan Alalak membutuhkan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan industri multi sektoral. Salah satu infrastruktur yang penting adalah jalan yang memadai sebagai akses utama yang menghubungkan antara satu wilayah ke wilayah yang lain. Meskipun sebagian besar keadaan jalan mayoritas sudah beraspal, namun masih ada sekitar 9,3 km kondisi jalannya masih berupa kerikil, kondisi jalan yang rusak sepanjang 2,9 km, dan rusak berat sepanjang 1,9 km. Kondisi ini masih memerlukan perhatian besar kabupaten untuk terus melakukan perbaikan.

## 5. Kecamatan Tabukan

**Tabel 9. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Tabukan**

	<b>Desa</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase</b>
	(1)	(2)	(3)
1	Pantang Baru	14.00	8.43
2	Pantang Raya	14.00	8.43
3	Bandar Karya	1.58	0.95
4	Tabukan Raya	0.31	0.19
5	Karya Indah	5.56	3.34
6	Karya Jadi	15.30	9.22
7	Karya Makmur	24.65	14.84
8	Teluk Tamba	12.10	7.29
9	Tamba Jaya	35.50	21.38
10	Rantau Bamban	12.00	7.23
11	Muara Pulau	31.00	18.67
	Jumlah	166.00	100

Sumber : Kecamatan dalam Angka, BPS, 2017



Secara geografis, Kecamatan Tabukan di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Marabahan dan Barambai, di sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Kuripan, dan sebelah barat dan utara berbatasan dengan propinsi Kalimantan Tengah. Kecamatan Tabukan memiliki luas wilayah 166 km<sup>2</sup> (lihat tabel 9).

Dengan wilayah 166 km<sup>2</sup>, kecamatan Tabukan memiliki jumlah penduduk berkisar 8.942 jiwa yang terdiri atas laki-laki 4.473 jiwa dan perempuan 4.469 jiwa. Kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk sebesar 53.86 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk tersebut bertempat tinggal tersebar ke sebelas desa dengan tingkat persebaran penduduk yang relatif beragam (lihat tabel 10).

**Tabel 10. Rata-Rata Penduduk Per Desa di Kecamatan Tabukan, 2017**

	<b>Desa</b>	<b>Luas Wilayah (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>	<b>Rata-Rata Penduduk (jiwa/km<sup>2</sup>)</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pantang Baru	14.00	640	45.71
2	Pantang Raya	14.00	918	65.57
3	Bandar Karya	1.58	833	527.22
4	Tabukan Raya	0.31	1.170	3.774.19
5	Karya Indah	5.56	527	94.61
6	Karya Jadi	15.30	772	50.46
7	Karya Makmur	24.65	1.215	49.29
8	Teluk Tamba	12.10	887	73.31
9	Tamba Jaya	35.50	293	8.25
10	Rantau Bamban	12.00	637	53.08
11	Muara Pulau	31.00	1.050	33.87
		166.01	8.942	53.86

Sumber : Kecamatan dalam Angka, BPS, 2017

Desa yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah desa Tabukan Raya karena luas wilayahnya yang hanya 0,31 km<sup>2</sup> namun memiliki jumlah penduduk 1.170 jiwa. Kondisi ini berbanding terbalik dengan desa Tamba Jaya yang merupakan desa paling luas wilayahnya (35,5 km<sup>2</sup>), namun memiliki jumlah penduduk terkecil, yaitu 293 jiwa.

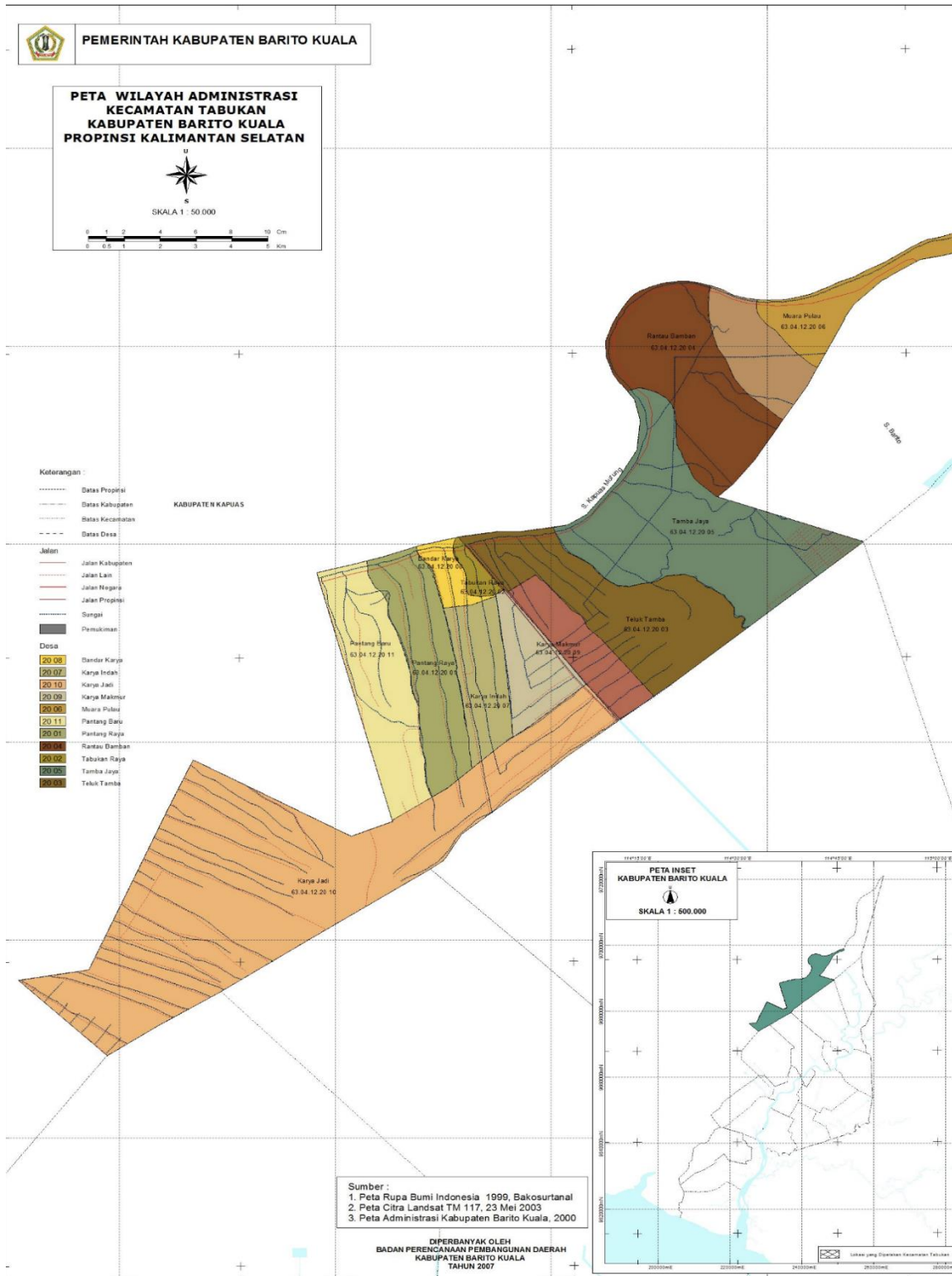
Berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, kecamatan Tabukan merupakan salah satu wilayah yang akan dijadikan sebagai pusat kegiatan lokal promosi (PKLp) bersama dengan kecamatan Tabunganen dan Anjir Pasar. PKLp ini memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan pemukiman dan fasilitas penunjangnya, psat pengembangan komoditas hasil pertanian, pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal, dan pusat pengembangan fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, di kecamatan ini nantinya akan dikembangkan pembangunan transportasi darat, seperti jalan, jembatan, terminal dan transportasi sungai berupa dermaga. Hal ini penting untuk menunjang distribusi perdagangan barang dan jasa dan kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Struktur ekonomi Kecamatan Tabukan bergerak di wilayah pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan lahan yang mayoritas ditujukan sebagai lahan sawah seluas 3.240 hektar (data tahun 2015). Pada tahun 2017, kecamatan ini mampu memberikan kontribusi produksi padi sebesar 22.788 ton. Namun sayangnya, angka produksi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2016) yang mampu mencapai 45.388 ton. Padahal luas lahan panen terus meningkat setiap tahunnya. Selain padi, kecamatan ini juga diperuntukkan sebagai kawasan pertanian hortikultura

seperti buah-buahan. Namun, tingkat produktivitas buah-buahan di kecamatan Tabukan masih di bawah rata-rata produktivitas kabupaten. Artinya, hasil yang dicapai selama ini masih belum memuaskan. Misal, pada tahun 2017 produksi buah mangga hanya mencapai 30,8 ton. Sedangkan kecamatan lainnya, seperti kecamatan Anjir Muara mampu menghasilkan buah mangga sebanyak 2.004 ton.

Di sektor perkebunan, Tabukan juga diharapkan mampu mengembangkan komoditas perkebunan seperti karet, kelapa sawit, kelapa dalam, dan purun, meskipun jika dilihat hasilnya pada tahun 2017 lalu, komoditas perkebunan tersebut masih belum optimal. Misalnya saja karet hanya mampu memproduksi 35 ton, kelapa dalam 22 ton, kelapa sawit 25 ton, dan purun 60 ton. Bandingkan dengan kecamatan Wanaraya yang mampu menghasilkan 1.126 ton karet dan 1.730 ton kelapa sawit. Di sektor peternakan kecamatan ini menjadi salah satu sentra pengembangan ternak unggas; ayam ras, ayam kampung, dan itik. Meskipun demikian produksi unggas di kecamatan Tabukan masih rendah jika dibandingkan dengan sentra di kecamatan Wanaraya ataupun Anjir Muara.

Dengan struktur tanah rawa, kecamatan Tabukan juga menjadi kawasan strategis propinsi untuk dikembangkan menjadi kawasan potensi Batang Banyu bersama kecamatan Belawang, kecamatan Barambai, kecamatan Cerbon, kecamatan Wanaraya, kecamatan Bakumpai dan kecamatan Kuripan.



. Selain itu kecamatan ini ditujukan juga untuk menjadi kawasan permukiman pedesaan. Artinya, pengembangan wilayah permukiman di kecamatan ini berbasis pada pertanian, peternakan dan perikanan.

Pembangunan ekonomi di kecamatan Tabukan harus mendapatkan dukungan infrastruktur yang memadai. Sayangnya, kondisi jalan kabupaten sangat buruk di wilayah ini. Jalan yang mengalami rusak berat terpanjang ada di kecamatan Tabukan yaitu 14,9 km. Selain itu kondisi jalan jugamasih ada yang berupa tanah dan belum beraspal sepanjang 29,6 km. Hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten maupun propinsi karena jalan merupakan akses penting yang menghubungkan satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga proses pembangunan dan distribusi hasil-hasil pertanian dapat berlangsung lancar.

## **6. Kecamatan Anjir Muara**

Secara geografis, kecamatan ini berbatasan di sebelah timur dengan kecamatan Alalak, di sebelah barat dengan kecamatan Anjir Pasar, di sebelah utara dengan kecamatan Jejangkit dan di sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Mekarsari dan Tamban. Kecamatan Anjir Muara ini memiliki luas wilayah 116.75 km<sup>2</sup> dan tersebar ke lima belas (15) desa dengan penyebaran luas wilayah yang relatif beragam.

**Tabel 11. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Anjir Muara**

	<b>Desa</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase</b>
	(1)	(2)	(3)
1	Anjir Serapat Muara	4.00	3.43
2	Anjir Muara Kota	5.00	4.28
3	Patih Muhur Lama	7.50	6.42
4	Anjir Muara Kota Tengah	7.00	6.00
5	Anjir Serapat Lama	10.00	8.57
6	Anjir Serapat Baru	12.00	10.28
7	Sungai Punggu	4.00	3.43
8	Anjir Serapat Baru I	12.00	10.28
9	Patih Muhur Baru	7.50	6.42
10	Sungai Punggu Baru	6.00	5.14
11	Anjir Serapat Muara I	15.00	12.85
12	Anjir Muara Lama	6.00	5.14
13	Sepakat Bersama	9.50	8.00
14	Marabahan Baru	5.00	4.28
15	Beringin Jaya	6.25	5.35
	Jumlah	116.75	100

Sumber : Kecamatan dalam Angka, BPS, 2017

Ada empat (4) buah desa yang luas wilayahnya sama atau lebih dari 10 km persegi, yaitu Anjir Serapat Lama, Anjir Serapat Baru, Anjir Serapat Baru I, dan Anjir Serapat Muara I. Sedangkan 11 desa lainnya memiliki luas wilayah kurang dari 10 km persegi. (lihat tabel 11).

Kecamatan Anjir Muara ini pada tahun 2017 memiliki proyeksi jumlah penduduk sebesar 21.256 jiwa yang terdiri atas laki-laki 10.671 jiwa dan perempuan 10.585 jiwa. Dengan jumlah penduduk di atas 21 ribu jiwa di wilayah 116.75 km persegi, kepadatan penduduk kecamatan Anjir Muara ini cukup tinggi yaitu 182.06 jiwa per km persegi.

**Tabel 12. Rata-Rata Penduduk Per Desa di Kecamatan Anjir Muara, 2017**

	<b>Desa</b>	<b>Luas Wilayah (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>	<b>Rata-Rata Penduduk (jiwa/km<sup>2</sup>)</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Anjir Serapat Muara	4.00	1.469	367.25
2	Anjir Muara Kota	5.00	2.360	472.00
3	Patih Muhur Lama	7.50	861	114.80
4	Anjir Muara Kota Tengah	7.00	2.068	295.43
5	Anjir Serapat Lama	10.00	983	98.30
6	Anjir Serapat Baru	12.00	1.540	128.33
7	Sungai Punggu	4.00	1.312	328.00
8	Anjir Serapat Baru I	12.00	1.419	118.25
9	Patih Muhur Baru	7.50	932	124.27
10	Sungai Punggu Baru	6.00	1.477	246.17
11	Anjir Serapat Muara I	15.00	2.041	136.07
12	Anjir Muara Lama	6.00	1.984	330.67
13	Sepakat Bersama	9.50	501	52.74
14	Marabahan Baru	5.00	1.245	249.00
15	Beringin Jaya	6.25	1.064	170.24
	<b>Jumlah</b>	<b>116.75</b>	<b>21.256</b>	<b>182.06</b>

Sumber : Kecamatan dalam Angka, BPS, 2017

Jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, seperti kecamatan Tamban (199.64 jiwa/km), Alalak (533.88 jiwa/km) dan Wanaraya (356.08 jiwa/km), maka kepadatan penduduk Anjir Muara relatif tinggi. (lihat tabel 12).

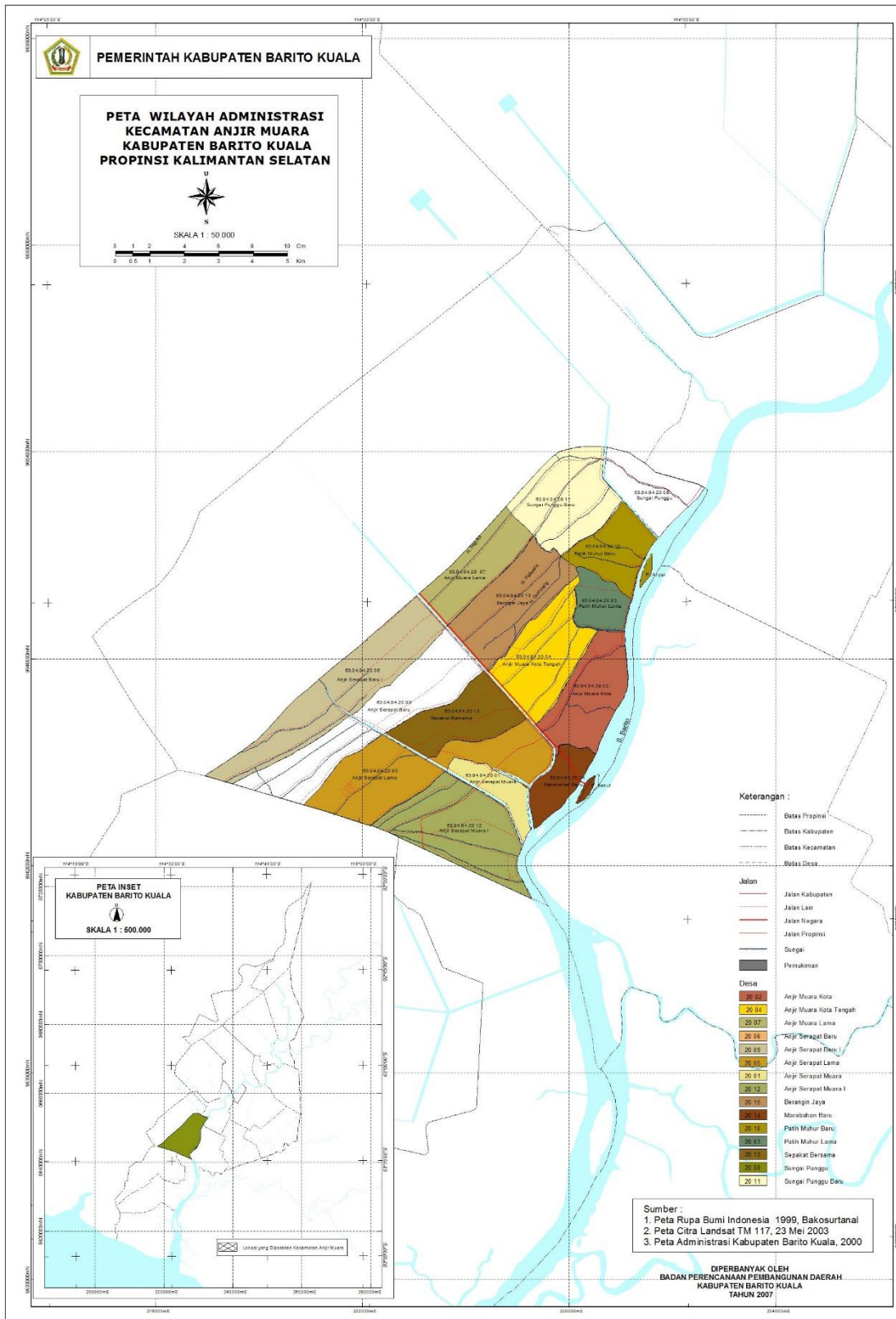
Pertanian merupakan sektor potensial di Kecamatan Anjir Muara, dengan luas sawah tanam mencapai 7.216 Ha yang memberikan hasil 27.192 ton di tahun 2016. Hal ini menjadikan Kecamatan Anjir Muara sebagai penghasil beras terbesar ketiga setelah kecamatan Tabunganen dan Tabukan. Selain padi Kecamatan Alalak juga berpotensi

memproduksi untuk buah-buahan yaitu jeruk 36.508 pohon, mangga 43.000 pohon, pisang 2.500 pohon, nenas 35.750 pohon, rambutan 3.800 pohon. Meskipun demikian, hasil produksi buah-buahan di wilayah ini masih belum maksimal jika dibandingkan dengan wilayah lain yang memiliki potensi yang sama. Pada tahun 2016, kecamatan Anjir Muara ini hanya mampu memproduksi 1.647 ton jeruk dan 1.542 ton mangga. Sedangkan produksi jenis buah-buahan lainnya hanya berada di bawah 50 ton.

Selain pertanian, data potensi perkebunan di Kecamatan Anjir Muara menunjukkan bahwa potensi terbesar ada pada budidaya sagu dengan luas lahan 1.401 hektar, kelapa sawit dengan luas lahan 600 hektar, disusul karet 25 ha dan kelapa dalam 406 hektar pada tahun 2017. Perkembangan lahan perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan cukup signifikan yang sebelumnya hanya seluas 15 hektar pada tahun 2010. Sayangnya, hanya produksi tanaman sagu saja yang membawa hasil signifikan pada tahun 2016, yaitu sebesar 625 ton.

Sedangkan di sektor peternakan, kecamatan Alalak membudidayakan populasi unggas khususnya ayam kampung, ayam pedaging, dan itik. Di sektor perikanan, jumlah rumah tangga yang terlibat dalam budidaya perikanan tangkap di perairan umum mencapai 518 orang, jumlah terbesar kedua setelah kecamatan Kuripan. Pada tahun 2016, produksi perikanan tangkap ini mampu mencapai 748,7 ton. Hasil ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 707 ton. Namun sayangnya, nilai yang diperoleh mengalami penurunan dari 13.671 juta rupiah pada tahun 2015 menjadi 12.578 juta rupiah pada tahun 2016.





Di sektor industri, kecamatan Anjir Muara merupakan wilayah yang memiliki jumlah industri terbesar kedua di kabupaten Barito Kuala, yaitu sebanyak 458 buah dengan angka penyerapan tenaga kerja 687 orang dan nilai investasi sebesar 2.943.000. Sektor ini cukup berpotensi untuk berkembang di tahun-tahun mendatang karena salah satu infrastruktur penting dalam pembangunan, yaitu keadaan jalan yang mayoritas sudah beraspal. Namun, masih ada sekitar 12,7 km kondisi jalan yang rusak dan 9.65 km dengan kondisi sedang.

## **7. Kondisi Geografis, Sosial dan Ekonomi Kecamatan Rantau Badauh**

Secara geografis, kecamatan ini berbatasan di sebelah timur dengan kecamatan Cerbon, di sebelah barat dengan kecamatan Mandastana, di sebelah utara dengan kecamatan Barambai dan kecamatan Belawang dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jejangkit. Kecamatan Rantau Badauh ini memiliki luas wilayah 261.81 km<sup>2</sup> dan tersebar ke 9 (sembilan) desa dengan penyebaran luas wilayah yang relatif beragam. Rata-rata luas wilayah desa yang ada di kecamatan ini di atas 20 km persegi. Namun ada tiga desa yang luasnya kurang dari itu, yaitu hanya 15-16 km persegi, desa-desa tersebut adalah desa Sungai Baman, desa Sinar Baru dan desa Simpang Arja (lihat tabel 13).

**Tabel 13. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Rantau Badauh**

	<b>Desa</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase</b>
	(1)	(2)	(3)
1	Sungai Pantai	51.81	19.79
2	Pindahan Baru	31.00	11.84
3	Danda Jaya	24.00	9.17
4	Sungai Gampa Asahi	33.00	12.60
5	Sungai Bamban	15.00	5.73
6	Sungai Gampa	29.00	11.08
7	Sungai Sahurai	47.00	17.95
8	Simpang Arja	16.00	6.11
9	Sinar Baru	15.00	5.73
	Jumlah	261.81	100.00

Sumber : Kecamatan dalam Angka, BPS, 2017

Kecamatan Rantau Badauh pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebesar 15.541 jiwa yang terdiri atas laki-laki 7.806 jiwa dan perempuan 7.735 jiwa atau sebesar 5,08 persen dari jumlah penduduk kabupaten Barito Kuala. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 15 ribu jiwa di wilayah 261.81 km persegi, kepadatan penduduk kecamatan Rantau Badauh adalah 59 jiwa per km persegi. Jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, seperti kecamatan Tamban (202 jiwa/km), Alalak (543 jiwa/km) dan Wanaraya (360 jiwa/km), maka kepadatan penduduk Rantau Badauh relatif rendah. (lihat tabel 14).

**Tabel 14. Rata-Rata Penduduk Per Desa di Kecamatan Rantau Badauh, 2017**

	<b>Desa</b>	<b>Luas Wilayah (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>	<b>Rata-Rata Penduduk (jiwa/km<sup>2</sup>)</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sungai Pantai	51.81	1.786	34.47
2	Pindahan Baru	31.00	1.424	45.94
3	Danda Jaya	24.00	2.902	120.92
4	Sungai Gampa Asahi	33.00	1.866	56.65
5	Sungai Bamban	15.00	905	60.33
6	Sungai Gampa	29.00	2.581	89.00
7	Sungai Sahurai	47.00	1.567	33.34
8	Simpang Arja	16.00	865	54.06
9	Sinar Baru	15.00	1.645	109.67
	<b>Jumlah</b>	<b>261.81</b>	<b>15.541</b>	<b>59.36</b>

Sumber : Kecamatan dalam Angka, BPS, 2017

Sektor pertanian merupakan basis perekonomian masyarakat yang tinggal di kecamatan Rantau Badauh. Berdasarkan data BPS tahun 2017, kecamatan ini memiliki lahan sawah paling luas di kabupaten Barito Kuala yaitu 17.657 hektar yang terdiri atas sawah irigasi 801 hektar dan sawah non irigasi 16.856 hektar. Selain persawahan, kecamatan ini juga memiliki lahan untuk ladang/tegal seluas 2.310 hektar dan merupakan lahan terluas kedua setelah kecamatan Mekarsari (2.725 ha).

Pada tahun 2016, kecamatan ini mampu memproduksi padi sebanyak 27,3 ton dari 7.728 hektar lahan panen. Produksi padi ini meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 29,36 dari 7.632 hektar luas lahan panen. Jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Barito Kuala yang memiliki luas panen yang kurang lebih sama (di atas 7.000 hektar) seperti Kecamatan Tamban (26 ton), Kecamatan Anjir Pasar (29,4 ton) Barambai (27,9 ton) dan Anjir Muara (27,1 ton), maka tingkat produksi

padi di Rantau Badauh cukup mampu bersaing. Berikut data produksi padi sawah di kecamatan Rantau Badauh :

**Tabel 15. Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Tiap Desa di Rantau Badauh, 2016**

	<b>Desa</b>	<b>Luas Panen (Ha)</b>	<b>Produksi (Ton)</b>
	(1)	(2)	(3)
1	Sungai Pantai	1.080	3
2	Pindahan Baru	1.051	3.2
3	Danda Jaya	1.342	3.3
4	Sungai Gampa Asahi	1.356	2.8
5	Sungai Bamban	838	2.6
6	Sungai Gampa	475	3
7	Sungai Sahurai	634	2.7
8	Simpang Arja	370	3.3
9	Sinar Baru	582	3.4
	Jumlah	7.728	27.3

Sumber : Kecamatan dalam Angka, BPS, 2017

Selain tanaman padi, Rantau Badauh juga memproduksi jagung, ubi kayu dan kedelai. Ada lima kecamatan yang juga memproduksi jagung dan kedelai dalam skala yang cukup besar termasuk Rantau Badauh, yaitu Anjir Pasar, Wanaraya, Cerbon dan Marabahan. Lima kecamatan tersebut mampu memproduksi jagung lebih dari 40 ton/tahun, kedelai 20 ton/ tahun dan ubi kayu lebih dari 800 ton/tahun. Namun pada tahun 2017, produksi jagung dan ubi kayu mengalami penurunan cukup drastis jika dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini disebabkan karena areal lahan panen mengalami penurunan. Kecamatan Rantau Badauh mampu memproduksi jagung pada tahun 2016 sebanyak 69 ton, sedangkan pada tahun 2017 hanya mampu menghasilkan 62 ton. Sedangkan ubi kayu pada tahun 2017 hanya mampu menghasilkan 983 ton, padahal sebelumnya telah mencapai produksi 1.564 ton.

Produksi tanaman buah-buahan juga cukup menjanjikan. Kecamatan Rantau Badauh pada tahun 2017 menjadi produsen durian terbesar di kabupaten Barito Kuala, yaitu 111,9 ton dan ketiga terbesar wilayah penghasil buah jeruk selain Mandastana dan Belawang. Pada tahun 2016 wilayah ini mampu menghasilkan 2.914 ton jeruk, 62 ton mangga, 34.4 ton nangka, 442 ton pisang, dan 500 ton rambutan. Produksi buah-buahan ini meningkat pada tahun 2017, yaitu 8.511 ton jeruk, 256 ton mangga, 171,5 ton nangka, dan 165 ton pisang. Bahkan Rantau Badauh merupakan produsen terbesar buah pisang di Barito Kuala. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecamatan Rantau Badauh merupakan salah satu kecamatan di Barito Kuala yang memiliki potensi besar di wilayah pertanian khususnya sebagai penghasil padi, ubi kayu dan buah-buahan.

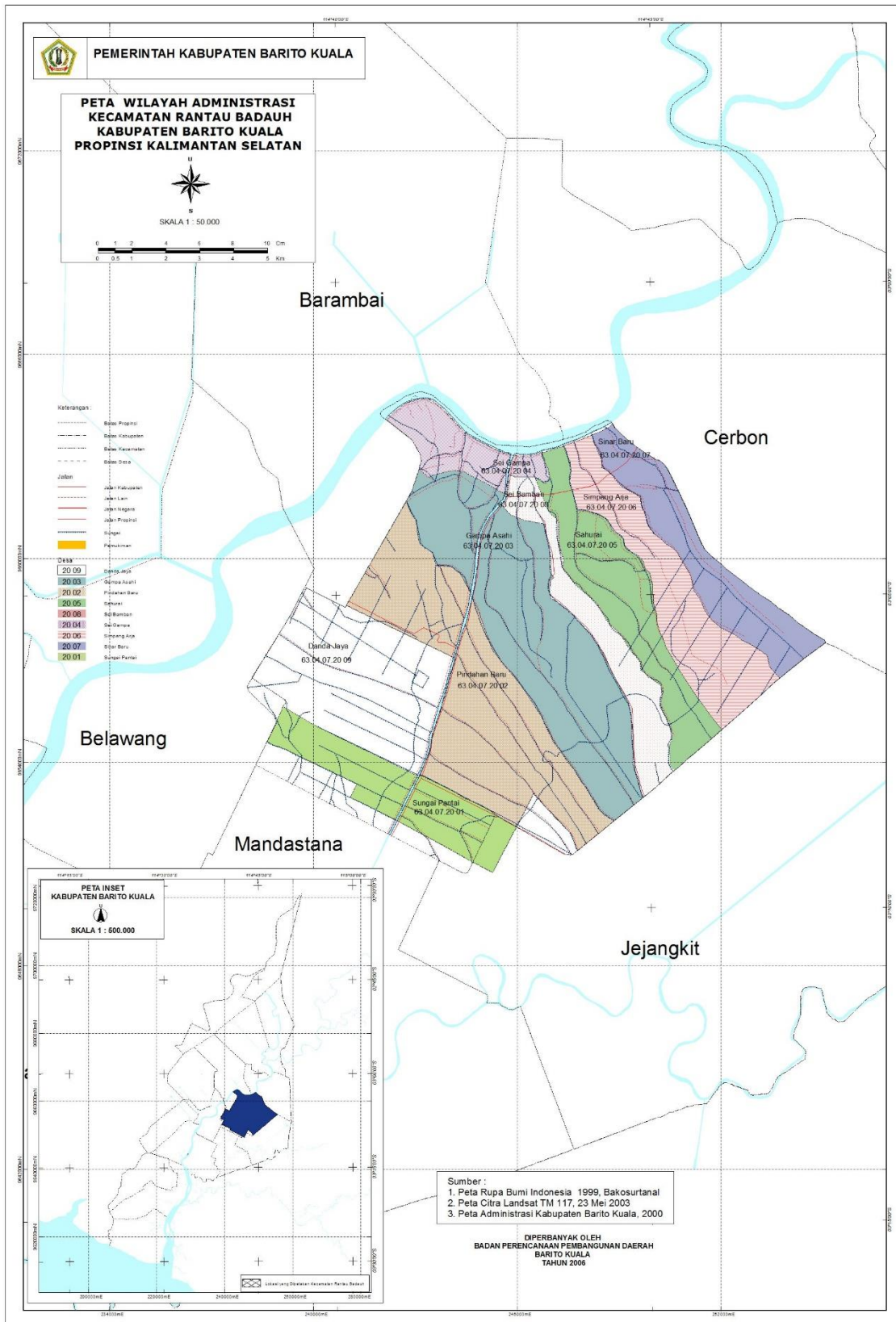
Di sektor peternakan, kecamatan ini juga merupakan produsen sapi potong ketiga di kabupaten selain Barambai dan Wanaraya. Sedangkan di sektor perikanan, ia mampu menghasilkan ikan di perairan umum sebesar 1.27 ton pada tahun 2016 dengan nilai 34.647.200 rupiah. Ada empat kecamatan lainnya di Barito Kuala yang juga memiliki potensi besar di wilayah perikanan, yaitu Anjir Muara, Bakumpai, Marabahan dan Kuripan.

**Tabel 16. Produksi Pertanian, Tanaman Sayuran, Buah-Buahan dan Perkebunan Selain Tanaman Padi, 2017**

	Desa	Luas Panen (Ha)	Jumlah Panen (pohon)	Produksi (Ton)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jagung	13	-	62
2	Kedelai	26	-	32
3	Ubi Kayu	22	-	983
4	Cabai	10	-	13
5	Kacang Panjang	2	-	0.4
4	Jeruk	-	157.020	2.914
5	Mangga	-	2.800	62
6	Durian	-	650	45
7	Nangka	-	2.450	34.4
8	Pisang	-	5.500	442.3
9	Rambutan	-	667	500
10	Karet	50	-	-
11	Kelapa Sawit	752	-	-

Sumber : Kabupaten dalam Angka, 2018

Selain sektor pertanian, di sektor industri kecamatan ini juga memiliki jumlah perusahaan yang cukup banyak. Ada 425 buah perusahaan yang mampu menyerap 898 tenaga kerja. Tentu saja peningkatan infrastruktur berupa akses jalan yang menghubungkan antar desa satu dengan desa yang lain masih perlu mendapatkan perhatian. Dengan luas wilayah yang cukup besar, jalan yang sudah tersedia hanya mencapai 12.000 km dan merupakan panjang jalan terpendek yang ada di kabupaten Barito Kuala.





## 8. Kecamatan Mandastana

Secara geografis, kecamatan ini berbatasan di sebelah timur dengan kecamatan Jejangkit, di sebelah barat dengan kecamatan Alalak, di sebelah utara dengan kecamatan Belawang dan di sebelah selatan berbatasan dengan kota Banjarmasin. Kecamatan Mandastana ini memiliki luas wilayah 139 km<sup>2</sup> dan tersebar ke empat belas (14) desa dengan penyebaran luas wilayah yang relatif beragam. Ada lima (5) buah desa yang luas wilayahnya lebih dari 10 km persegi, yaitu, Puntik Dalam, Tebing Rimbah, Bangkit Baru, Tatah Alayung dan Pantai Hambawang. Sedangkan 10 desa lainnya memiliki luas wilayah sama atau kurang dari 10 km persegi. (lihat tabel 17).

**Tabel 17. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Mandastana**

	<b>Desa</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase</b>
	(1)	(2)	(3)
1	Lok Rawa	8.00	5.88
2	Terantang	8.00	5.88
3	Sei Rmania	5.00	3.68
4	Puntik Luar	10.50	7.72
5	Puntik Tengah	10.00	7.35
6	Puntik Dalam	12.05	8.86
7	Karang Indah	4.92	3.62
8	Karang Bunga	8.03	5.90
9	Tebing Rimbah	18.00	13.24
10	Bangkit Baru	12.00	8.82
11	Tanipah	6.50	4.78
12	Tatah Alayung	12.00	8.82
13	Antasan Segera	10.00	7.35
14	Pantai Hambawang	11.00	8.09
	Jumlah	136.00	100.00

Sumber : Kecamatan dalam Angka, BPS, 2017

Kecamatan Mandastana ini pada tahun 2017 memiliki proyeksi jumlah penduduk sebesar 15.898 jiwa yang terdiri atas laki-laki 7.872 jiwa dan perempuan 7.792 jiwa. Dengan jumlah penduduk kurang dari 20 ribu jiwa di wilayah 136 km persegi, kepadatan penduduk kecamatan Anjir Muara menjadi 115.18 jiwa per km persegi. Jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, seperti kecamatan Tamban (199.64 jiwa/km), Alalak (533.88 jiwa/km) dan Wanaraya (356.08 jiwa/km), maka kepadatan penduduk Mandastana relatif sedang. (lihat tabel 18).

**Tabel 18. Rata-Rata Penduduk Per Desa di Kecamatan Mandastana, 2017**

	<b>Desa</b>	<b>Luas Wilayah (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>	<b>Rata-Rata Penduduk (jiwa/km<sup>2</sup>)</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lok Rawa	8.00	1.009	126.12
2	Terantang	8.00	1.935	241.88
3	Sei Rmania	5.00	458	91.60
4	Puntik Luar	10.50	1.373	130.76
5	Puntik Tengah	10.00	1.627	162.70
6	Puntik Dalam	12.05	850	70.54
7	Karang Indah	4.92	1.039	211.18
8	Karang Bunga	8.03	1.831	228.02
9	Tebing Rimbah	18.00	1.726	95.89
10	Bangkit Baru	12.00	637	53.08
11	Tanipah	6.50	935	143.85
12	Tatah Alayung	12.00	865	72.08
13	Antasan Segera	10.00	854	85.40
14	Pantai Hambawang	11.00	759	69.00
	<b>Jumlah</b>	<b>136.00</b>	<b>15.898</b>	<b>116.89</b>

Sumber : Kecamatan dalam Angka, BPS, 2017

Berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten Barito Kuala, kecamatan Mandastana diperuntukkan untuk menjadi salah satu Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dari 11 kecamatan yang ada di kabupaten, yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Secara spesifik, PPK kecamatan Mandastana, Kuripan, Bakumpai, Barambai, Cerbon, Jejangkit dan Mekarsari memiliki fungsi pelayanan; pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya, pusat pengembangan komoditas hasil pertanian, dan pusat pengembangan fasilitas pendidikan.

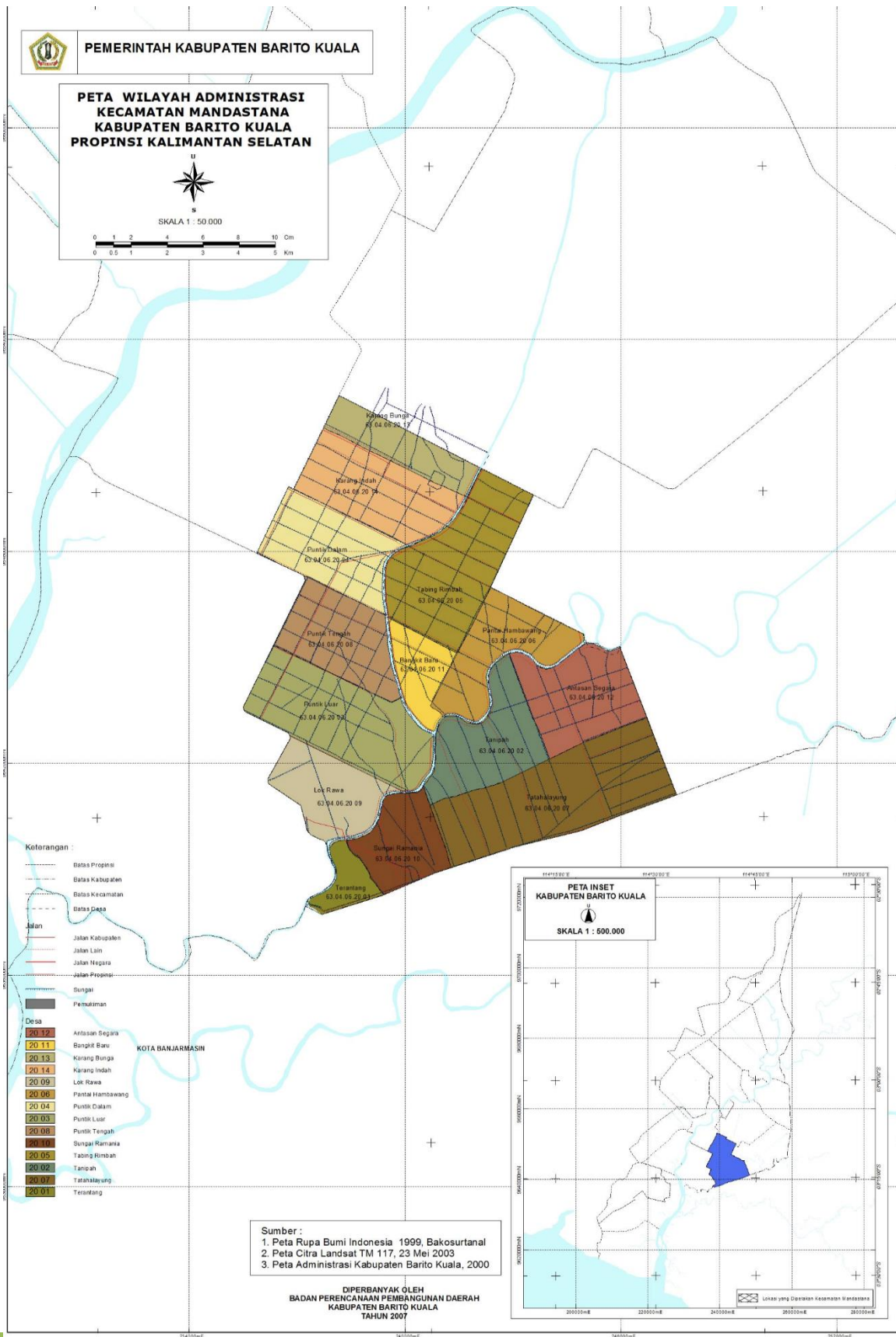
Kecamatan Mandastana memiliki basis perekonomian di sektor pertanian khususnya pertanian hortikultura. Produksi jeruk di kecamatan Mandastana merupakan yang terbesar di kabupaten atau bahkan di tingkat propinsi. Pada tahun 2017 produksi jeruk mencapai 28.332 ton. Produksi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mampu menghasilkan 29.014 ton. Menurut sekretariat daerah Kabupaten Barito Kuala, investasi di sektor pengelolaan komoditas jeruk memiliki potensi yang cukup besar mendatangkan keuntungan bagi daerah karena kabupaten Barito Kuala memiliki 8 (delapan) kecamatan penghasil jeruk yang masih bisa ditingkatkan produktivitasnya. Investasi di bidang pemasaran jeruk dapat dilakukan melalui pembelian langsung ke petani jeruk dan menjualnya lagi ke pasaran atau dikirim ke luar pulau untuk selanjutnya dijual atau diolah lagi menjadi produk makanan dan minuman serta olahan lainnya. Selain itu, investasi di bidang industri pengolahan jeruk menjadi makanan kecil ataupun minuman serta olahan lainnya juga berpotensi untuk dikembangkan. Selain jeruk, investasi pemasaran dan pengolahan buah nenas juga berpotensi untuk dilakukan di kecamatan Mandastana. Investasi untuk membuat

terminal agribisnis di kecamatan ini juga tampaknya patut untuk mendapatkan perhatian sehingga dapat menjadi proses transaksi pemasaran buah dan sayuran.

Di sektor peternakan, kecamatan Mandastana juga berpotensi untuk usaha budidaya kambing bersama dengan kecamatan Belawang dan Rantau Bedauh. Selain kambing, usaha budidaya burung puyuh juga berpotensi di kecamatan ini dan di kecamatan Jejangkit. Saat ini populasi burung puyuh 35.244 ekor dan masih bisa berkembang sampai 104.500 ekor. Kecamatan Mandastana juga menjadi sentra usaha ternak ayam kampung, ayam ras dan itik. Populasi ayam kampung dan itik di kecamatan ini masing-masing mencapai 110.869 ekor dan 5.323 ekor.

Di sektor perikanan, kecamatan Mandastana menjadi salah satu kawasan yang ditujukan untuk pengembangan perikanan budidaya kolam dan minipadi. Namun sampai dengan tahun 2017, kecamatan Mandastana belum banyak memberikan kontribusi ekonomi di sektor ini karena hanya menghasilkan 67,29 juta rupiah.

Di sektor pariwisata, kecamatan ini dirancang untuk menjadi destinasi wisata buatan berupa agropolitan Terantang (daya tarik tanah lapang dan danau). Kecamatan ini juga menjadi salah satu lokasi pengembangan kawasan transmigrasi yaitu Kota Terpadu Mandiri yang tersebar di kecamatan Marabahan, kecamatan Cerbon, kecamatan Rantau Badauh dan Jejangkit, bagian dari kawasan strategis propinsi yang dikenal dengan sebutan Kawasan Banjar Bakula (Metropolitan Banjarmasin Raya) dan kawasan strategis kabupaten dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu kawasan agropolitan.



**BAB V**  
**MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**  
**BERBASIS PERTANIAN DI KABUPATEN BARITO KUALA**

Berbicara tentang desa seringkali dilekatkan dengan kemiskinan, ketimpangan pembangunan, rendahnya tingkat sumberdaya manusia, dan minimnya infrastruktur serta fasilitas pendukung lainnya. Rogers (1969) mengemukakan ciri-ciri masyarakat pedesaan sebagai berikut; (a) *mutual distrust interpersonal relations*, yaitu adanya rasa tidak percaya secara timbal balik antara petani yang satu dengan yang lainnya. Hal ini biasanya terjadi karena masyarakat desa saling memperebutkan sumber-sumber ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas; (b) *perceived limited good*, yaitu pandangan yang sempit di kalangan petani, sehingga hal-hal baik dan kesempatan maju selalu terbatas; (c) *dependence on hostility towards government authority*, yaitu adanya ketergantungan dan sekaligus rasa curiga terhadap pemerintah atau pada unsur-unsur pemerintah; (d) *familism*, yaitu adanya pertalian kekeluargaan atau kekerabatan; (e) *lack of innovations*, yaitu adanya rasa enggan untuk menerima atau menciptakan ide-ide baru. Untuk mengubah keadaan ini perlu adanya pihak luar yang menggerakkan mereka; (f) *fatalism*, yaitu gambaran tentang rendahnya wawasan masyarakat desa untuk menanggapi atau merencanakan masa depan mereka; (g) *limited aspiration*, yaitu adanya aspirasi atau keinginan yang sangat rendah atau terbatas untuk mencapai masa depan. Aspirasi sosial sesungguhnya berupa gagasan, keinginan, ataupun cita-cita yang dimiliki seseorang mengenai masa depan didalam interaksinya dengan lingkungan sosialnya; (h) *lack of deferred gratification*, yaitu kekurangan sifat

menahan atau mengekang diri, misalnya kemauan mengorbankan kenikmatan sekarang demi pencapaian keuntungan yang lebih besar di masa depan. (i) *limited view of the world*, yaitu keterbatasan cara pandang masyarakat terhadap dunia luar. Hal ini terjadi karena terbatasnya jangkauan masyarakat dalam mengakses informasi yang datang dari luar; dan (j) *low empathy*, yaitu rendahnya keterampilan menangkap perasaan orang lain. Rendahnya empati masyarakat disebabkan oleh adanya jarak sosio-psikologis atau keterbatasan pengetahuan jika dibandingkan dengan masyarakat diluar mereka yang lebih maju.<sup>1</sup>

Gambaran yang serupa juga muncul di delapan desa lokasi penelitian di kabupaten Barito Kuala. Desa-desa di kabupaten Barito Kuala masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan, warga desanya relatif tidak memiliki inisitif dan gagasan untuk melakukan perubahan yang sesuai dengan potensi, persoalan dan kebutuhan di tingkat lokal, kapasitas pemerintahan desanya masih terbatas secara organisasional dan manajerial, serta nilai-nilai budaya lokal yang semakin terdegradasi. Akibatnya, harapan banyak pihak dalam mewujudkan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat yang berkelanjutan serta mandiri seperti yang tertuang di dalam UU No.6 Tahun 2014 menjadi sulit untuk dicapai.

Fakta-fakta yang digali dan ditemukan oleh studi di lapangan memang membuktikan keprihatinan atas minimnya kapasitas pemerintahan desa dalam menciptakan kemandirian desa berbasis partisipasi. Alih-alih menjadi mandiri, kebanyakan desa terjebak dengan besaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah

---

<sup>1</sup> Amalia dan Syawie, "Pembangunan Kemandirian Desa melalui Konsep Pemberdayaan : Suatu Kajian dalam Perspektif Sosiologi", *Sosio Informa Vol, 1, No.02*, 2015, hal. 178.

pusat yang sebenarnya ditujukan untuk membangun potensi ekonomi lokal. Mayoritas desa menggunakan dana desa tersebut hanya untuk membangun infrastruktur yang dalam jangka pendek memang berhasil membangun partisipasi warga desa karena iming-iming upah yang mereka dapatkan dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur desa, seperti pembuatan jalan, jembatan, sekolah, puskesmas dan lain-lain. Akibat pembangunan yang bias fisik tersebut menjadikan desa “tegantung” dengan dana desa dalam membangun desanya.

Oleh karena itu secara spesifik penelitian ini akan menjelaskan seberapa besar wajah kemandirian desa dalam membangun yang diukur melalui derajat kemampuan pengambilan keputusan pemerintahan desa dalam mengelola sendiri desanya, derajat ketergantungan struktural pemerintahan desa terhadap otoritas pemerintahan “atas desa”, dan stok modal sosial yang terkait dengan kondisi struktural-kultural masyarakat desa. Ketiga ranah tersebut dalam analogi teori strukturasi Giddens merupakan representasi hubungan timbal balik antara “struktur” dan “agen” dalam interaksi yang terpola dan berubah yang tidak berkesudahan (*formed and reformed of action recursively*).

Agen adalah setiap anggota masyarakat desa yang memproduksi pola kelakuan tertentu (*social practices and institution*) yang sesuai (*conform*) dengan anggota masyarakat desa lainnya sehingga pola tersebut terinternalisasi dengan beberapa hambatan struktural yang membatasi mereka dalam mereproduksi kelakuan selanjutnya. Sedangkan struktur adalah aturan dan sumberdaya atau seperangkat hubungan transformasi yang diorganisasikan sebagai sifat sistem-sistem sosial.



Terminologi struktur tidak saja menunjuk pada pengertian “pola hubungan sosial yang terpola manakala individu-individu berinteraksi dalam sistem masyarakat yang dibentuknya, namun struktur juga telah dipahami sebagai “orientasi-tindakan-dan-pemikiran” yang sedemikian tertanam dalam sistem sosial sehingga menjadi *platform* dan kekuatan pengatur (*social force*) dalam hubungan sosial tertentu.<sup>2</sup>

Hubungan timbal balik antara “agensi dan struktur” sangat mempengaruhi derajat kemandirian desa. Di satu sisi, faktor *human actors* (warga desa dan perangkat desa) pada umumnya menghadapi kemiskinan dalam menggalang inisiatif-inisiatif pembangunan yang otentik dan mencerminkan kebutuhan desa di tingkat lokal. Ketiadaan ide dan gagasan tersebut menyebabkan dampak bolak-balik terhadap kelembagaan pemerintahan desa berupa ketidakberdayaan untuk berperan sebagai “mesin perubahan sosial”. Di sisi yang lain, perangkat desa menghadapi ketidakberdayaan dalam menggalang kekuatan lokal (terutama dalam membangun aksi dan kesadaran kolektif atau bisa disebut pula dengan partisipasi). Seringkali kelembagaan pemerintahan desa menghadapi persoalan kekurangan stok modal sosial yang diperlukan sebagai energi (dalam bentuk *trust* dan jaringan sosial) bagi perubahan di aras kolektivitas sosial desa. Dengan kata lain, kelembagaan pemerintahan desa menghadapi persoalan pada dua sisi sekaligus yaitu institusi-organisasi pemerintahan dan *human actors*. Sehingga sangat logis jika pencarian terhadap model pemberdayaan masyarakat desa dimulai dari kedua sisi tersebut, yaitu struktur dan agen pemerintahan desa.

---

<sup>2</sup> Dolfsma and Verburg dalam Arya Hadi Darmawan, “Pembaruan Tata Pemerintahan Desa: Transformasi Struktur dan Agensi Kelembagaan Pemerintahan Desa Berbasis Kemitraan”, PSP3-IPB, 2006, hal. 273

Selain peningkatan kapasitas kelembagaan desa sebagai struktur yang membentuk pola perilaku agen, pemberdayaan desa juga mencakup peningkatan kapasitas agen itu sendiri, yaitu anggota masyarakat secara individu maupun kolektif. Tujuannya tentu saja agar para agen desa mampu memproduksi pola kelakuan tertentu secara partisipatif dan mandiri sehingga memberikan kontribusi yang sesuai dengan kebutuhan agen lainnya.

Dengan kata lain, penelitian ini berasumsi bahwa pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan memperkuat kapasitas potensial kelembagaan pemerintahan desa sembari di waktu yang sama juga memperkuat kapasitas potensial anggota masyarakat desa dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan politik desa secara berkelanjutan .

#### **A. Peningkatan Kapasitas “Stuktur” Kelembagaan Desa**

Kapasitas kelembagaan adalah tingkat kemampuan suatu badan/lembaga/organisasi dengan struktur pengorganisasian tertentu, proses-proses kerja, dan budaya kerja yang erat hubungannya dengan keterampilan dan kualifikasi individu berupa uraian pekerjaan, motivasi, dan sikap kerja dari individu-individu yang mendukung kelembagaan tersebut.<sup>3</sup> Kapasitas kelembagaan juga merupakan proses manajerial dalam konteks : (1) mengidentifikasi dan menganalisis persoalan lokal untuk merancang tanggapan yang tepat; (2) mengerahkan dan mengelola sumberdaya;

---

<sup>3</sup> Fredian Tonny Nasdian, *Kemitraan dalam Tata Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Komunitas Pedesaan dalam Perspektif Kelembagaan*, Working Paper Series 08, 2006, hal. 13-14.

(3) mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan implementasi kebijakan; dan (4) memecahkan konflik lokal.<sup>4</sup>

Menurut Milen (2001), peningkatan kapasitas kelembagaan adalah suatu proses berkelanjutan dimana individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat meningkatkan kemampuannya dalam kapasitas regulasi, yakni kemampuan pemerintahan desa mengatur kehidupan desa dan sumberdayanya berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, peningkatan kapasitas ekstraksi, yakni kemampuan mengumpulkan, mengerahkan, dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kebutuhan masyarakat desa. Menurut De Soto (2001), peningkatan kapasitas ekstraksi ini adalah kemampuan masyarakat desa memformulasikan aset-aset komunitas desa menjadi kapital.

Selain kapasitas ekstraksi, peningkatan kapasitas kelembagaan desa juga mencakup kapasitas distributif yaitu kemampuan pemerintah desa mendistribusikan atau “*sharing*” kekuasaan yang diterjemahkan sebagai pembagian sumberdaya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan desa. Selanjutnya, diperlukan pula peningkatan kapasitas responsif, yakni kemampuan untuk peka dan memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan dan pembangunan desa. Terakhir adalah peningkatan kapasitas jejaring dan kerjasama. Kapasitas jejaring adalah kemampuan desa mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraktif yang sudah dijelaskan sebelumnya.

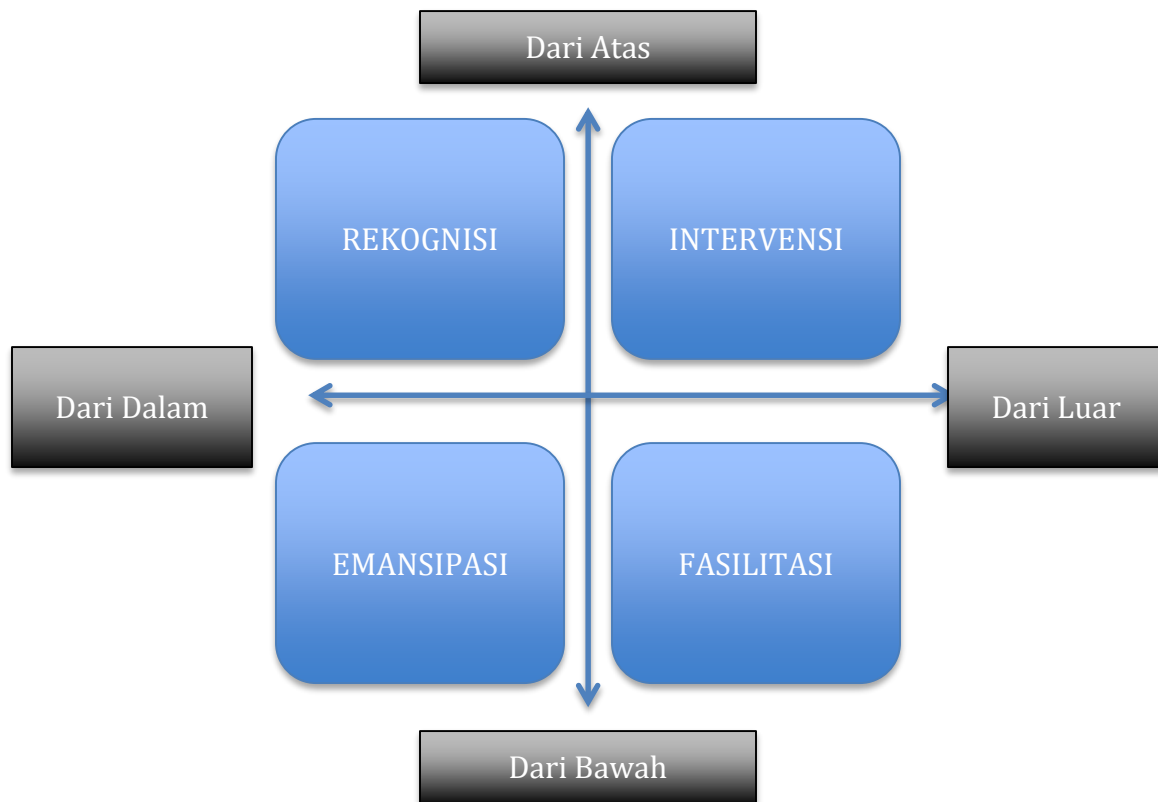
---

<sup>4</sup> Norman Uphoff and Milton J. Esman, *Local Organization for Rural Development: Analysis of Asian Experience*, Special Series on Rural Local Government, Ithaca: Cornell University, 1974

Pengembangan kelembagaan mencakup juga nilai-nilai, pengetahuan dan aturan main yang digunakan untuk membingkai tindakan setiap individu yang ada dalam lembaga tersebut. Menurut D.North (1990), lembaga adalah seperangkat aturan main dalam masyarakat atau lebih formal adalah perangkat pembatas yang membentuk interaksi antar manusia. Lebih lanjut North menjelaskan bahwa lembaga itu berbentuk pembatas formal (aturan, hukum, konstitusi), pembatas informal (nilai, norma, kebiasaan dan etika) serta karakteristik penegakkannya.

Melalui pendekatan kelembagaan, penelitian ini menawarkan model pemberdayaan masyarakat melalui empat bentuk inisiatif yang dilakukan para agen desa dalam membangun struktur desa yang mandiri, yaitu inisiatif dari dalam, dari luar, dari atas dan dari bawah (lihat bagan 1). Inisiatif dari dalam identik dengan otonomi asli desa. Artinya, desa memanfaatkan lembaga-lembaga asli desanya untuk membangun desanya secara mandiri. Inisiatif dari bawah artinya ada prakarsa dan gerakan desa secara mandiri mengenali dan memanfaatkan potensi lokal yang dimilikinya. Inisiatif dari luar berasal dari NGO (Non Government Organization), Perguruan Tinggi maupun lembaga-lembaga donor yang menjadi katalis atau pendorong pembangunan desa. Sedangkan inisiatif dari atas mengacu pada kebijakan dan program-program pemerintah dari pemerintah “atas” desa dalam rangka membangun dan memberdayakan masyarakat desa.

## Bagan 1. Empat Inisiatif Pemberdayaan Kelembagaan Desa



Sumber : Diadaptasi dari Sutoro Eko, Working Paper Seri 1/2011

Kombinasi keempat sumber inisiatif di atas menghasilkan empat tipe inisiatif membangun desa. *Pertama*, rekognisi (kombinasi antara inisiatif dari atas dan inisiatif dari dalam). Rekognisi adalah pengakuan pemerintah terhadap otonomi asli desa. Jika pemerintah ingin memperkuat desa maka tidak perlu lagi membentuk lembaga-lembaga baru. Sebaliknya, pemerintah harus mengakui, mendukung dan memperkuat aset dan lembaga-lembaga yang sudah ada. *Kedua*, emansipasi (kombinasi antara inisiatif dari dalam dan inisiatif dari bawah), yang berarti desa secara mandiri bangkit, berperan dan menggerakkan potensi lokal yang dimilikinya. *Ketiga*, fasilitasi (kombinasi antara inisiatif dari luar dan dari bawah) yang berarti komponen pihak

ketiga yang berasal dari luar desa telah mendorong, memudahkan dan mengembangkan kapasitas desa untuk membangun dirinya. *Keempat*, intervensi (kombinasi antara inisiatif dari atas dan dari luar), dimana kemitraan antara pemerintah dan pihak ketiga mendesain program dari atas kemudian diterapkan secara langsung di desa, seperti yang dijalankan oleh PNPM Mandiri.<sup>5</sup>

Untuk mencapai desa yang mandiri, maka strategi utama yang sebaiknya dikembangkan adalah emansipasi (inisiatif dari desa dengan mengandalkan pada kapasitas lokal yang ada di desa) dan rekognisi dari atas. Namun, emansipasi ini membutuhkan kemampuan lokal desa. Sementara, kapasitas lokal desa-desa yang ada di Kabupaten Barito Kuala pada umumnya masih lemah dan sumber daya manusia yang menopang kelembagaan desa tersebut memiliki kompetensi kultural yang rendah sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi politik dan sosial ekonomi di aras desa. Oleh karena itu model pemberdayaan desa dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan desa di kabupaten Barito Kuala yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara fasilitasi dari pemerintah dan pihak luar desa dengan emansipasi lokal desa. Kombinasi tersebut terbukti mampu memperkuat kelembagaan lokal desa di satu sisi dan modal sosial di sisi lain. Di desa Jejangkit Timur terlihat keberhasilan dalam pemberdayaan desa melalui fasilitasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa untuk menemukan potensi desa dan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desanya.

---

<sup>5</sup> Sutoro Eko & Bornie Kurniawan, "Dulu Emansipasi Sekarang Intervensi Studi tentang Institusi Lokal di Ranah Desa", *Working Paper Seri 1/Julai 2011*, IRE Yogyakarta.

## B. Dinamika Kelembagaan dalam Pemberdayaan Desa

Untuk bisa mencapai derajat kemandirian desa yang sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi lokal, maka harus dilakukan pentahapan pengembangan kelembagaan pemerintahan desa. Dengan mengadaptasi konsep “state building” dari Fukuyama (2004), akan didapatkan dua dasar penting terbentuknya sebuah tata pemerintahan desa yang efektif, yaitu (1) derajat efektifitas pemerintahan yang tinggi, dan (2) ruang lingkup dari fungsi yang dijalankan oleh pemerintah. Dari konsepsi Fukuyama tersebut, dirumuskan empat bentuk tata kelola pemerintahan desa sebagaimana tampak pada bagan 2 di bawah ini.



Sumber : Diadaptasi dari Arya Hadi Darmawan (2006).

Ruang I merupakan wilayah pemerintahan desa dengan rentang fungsi dan kewenangan yang sangat luas namun memiliki kekuatan organisasi pemerintahan yang efektif dan kuat dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Ruang ini bila tercapai

merupakan kondisi ideal tata pemerintahan desa ala Indonesia seperti yang diamanatkan di dalam UU No.6 Tahun 2014.

Pada ruang II, terdapat wilayah desa dengan kelembagaan dan kapasitas pemerintahan yang sangat rendah (lemah) dalam menjalankan fungsi yang sangat luas. Tipe ini adalah tipikal desa yang ditemukan di Indonesia termasuk di Kabupaten Barito Kuala. Dalam posisi seperti ini bantuan dari kelembagaan “atas desa” mutlak diperlukan. Dengan kata lain fenomena ketergantungan pemerintah desa pada sumber daya luar tampak sangat menonjol di ruang II ini.

Ruang III mewakili kawasan dengan kapasitas kelembagaan yang lemah meskipun fungsi-fungsi yang dijalankan sebenarnya tidaklah banyak. Tipe tata kelola pemerintahan ini adalah tipe terburuk dari keempat tipe yang ada. Pemerintah desa gagal berperan meski dalam fungsinya yang minimal.

Sementara ruang IV merupakan tipe ideal sebuah tata pemerintahan lokal. Pemerintah desa tidak hanya mampu mengendalikan semua kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya untuk menopang dan mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian desa, namun ia juga memiliki fungsi yang terdiferensiasi dengan baik sehingga mampu fokus dan menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak luar pemerintahan desa untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan.

Oleh karena itu deskripsi terhadap kapasitas kelembagaan desa akan memfokuskan pada pemaparan tentang kemampuan agen dan struktur desa yang terjadi selama ini (dengan ciri-ciri tipe ruang II). Kapasitas kelembagaan akan melihat pada kemampuan struktur atau organisasi desa dalam menjalankan kapasitas



distributif, kapasitas regulasi, kapasitas responsif, kapasitas jejaring dan kerjasama, dan kapasitas ekstraktif. Kelima bentuk kapasitas tersebut melekat pada fungsi dan kewenangan desa yang terdapat dalam UU No.6 Tahun 2014.

### **C. Peningkatan Kapasitas “Agen” Desa Secara Individual maupun Kolektif**

Bagaimana memberdayakan warga desa merupakan satu masalah tersendiri yang berkaitan dengan hakikat dari kekuasaan, serta hubungan antar individu atau lapisan sosial yang lain. Pada dasarnya setiap individu dan kelompok memiliki daya. Akan tetapi kadar daya itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait antara lain seperti pengetahuan, kemampuan, status, dan gender. Faktor-faktor yang saling terkait tersebut pada akhirnya membuat hubungan dengan dikotomi “subyek” (penguasa) dan “obyek” (yang dikuasai). Bentuk relasi sosial yang dicirikan dengan dikotomi subyek dan obyek tersebut merupakan relasi yang ingin “diperbaiki” melalui proses pemberdayaan.

Pemberdayaan merupakan proses “pematahan” dari hubungan atau relasi subyek dengan obyek. Proses ini mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya (kuasa) (flow of power) dari subyek ke obyek. Pemberian kuasa, kebebasan, dan pengakuan dari subyek ke obyek dengan memberinya kesempatan untuk meningkatkan hidupnya dengan memberinya kesempatan untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai sumber yang ada merupakan salah satu manifestasi dari mengalirnya daya tersebut. Pada akhirnya,

kemampuan individu miskin untuk dapat mewujudkan harapannya dengan diberinya pengakuan oleh subyek merupakan bukti bahwa individu dan kelompok tersebut memiliki daya. Dengan kata lain, mengalirnya daya ini dapat berwujud suatu upaya dari obyek untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai daya yang ada padanya serta dibantu juga dengan daya yang dimiliki subyek. Dalam pengertian yang lebih luas, mengalirnya daya ini merupakan upaya atau cita-cita untuk mensinergikan masyarakat miskin ke dalam aspek kehidupan yang lebih luas. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah “beralihnya fungsi individu atau kelompok yang semula sebagai obyek menjadi subyek (yang baru)”, sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antara “subyek” dengan “subyek” yang lain. Dengan demikian, proses pemberdayaan mengubah pola relasi lama subyek-obyek menjadi subyek-subyek.

Tentu saja pada tataran implementasi keadaan tersebut sangat sulit untuk dicapai. Daya (kuasa) yang mengalir hendaknya dapat bersifat positive-sum, artinya pemberi daya pada pihak lain juga dapat meningkatkan daya sendiri. Apabila daya suatu unit sosial secara keseluruhan meningkat, semua anggotanya dapat menikmati bersama-sama. Maka, pemberian daya kepada para “agen” desa yang mayoritas miskin dan marjinal secara tidak langsung juga akan meningkatkan daya si pemberi daya, yaitu pemerintah “atas” desa (penguasa).

Pemberian dana desa oleh pemerintah (penguasa) langsung kepada desa, misalnya, merupakan upaya untuk melahirkan aset desa yang memang dibutuhkan dan diinginkan oleh desa itu sendiri. Asumsinya, dengan terciptanya aset desa maka

struktur dan agen desa memiliki keinginan yang lebih kuat untuk terlibat dalam proses pembangunan desanya. Dengan kata lain, pemberdayaan struktur dan agen desa akan berada pada dua elemen pokok, yaitu kemandirian dan partisipasi. Struktur dan agen desa diharapkan mampu berpartisipasi untuk melahirkan kemandirian baik itu kemandirian material, kemandirian intelektual dan kemandirian manajemen.

Kemandirian material adalah kemampuan produktif dalam memenuhi kebutuhan materi dasar, cadangan atau bahkan kemampuan bertahan pada saat kritis. Memberikan akses terhadap sumberdaya lokal (potensi desa) dan menumbuhkan keterlibatan warga desa dalam mengelola sumberdaya tersebut menjadi salah satu upaya melahirkan kemandirian material di aras desa.

Kemandirian intelektual merupakan pembentukan dasar pengetahuan otonom yang memungkinkan mereka untuk menanggulangi bentuk-bentuk dominasi yang muncul diluar kontrol terhadap pengetahuan itu. Menumbuhkan kesadaran kritis dan kontrol sosial terhadap segala kegiatan pembangunan yang terjadi di desanya menjadi bagian dari bentuk kemandirian intelektual ini. Kemandirian manajemen adalah kemampuan otonom untuk membina diri dan menjalani serta mengelola sendiri segala kegiatan kolektif sehingga ada perubahan dalam kehidupan mereka.

#### **D. Tawaran Model Pemberdayaan**

Kata kunci yang penting dalam penelitian ini adalah bagaimanakah memberdayakan orang miskin yang tinggal di desa berbasis pertanian. Memahami dimensi kemiskinan tidak bisa hanya bersandar pada output yang dihasilkan oleh

setiap individu dan rumah tangga dalam menjalani kehidupannya. Rumah berdinding kayu, beralas tanah, kepemilikan kendaraan, atau perilaku makan sehari-hari merupakan output yang dihasilkan dari aktivitas individu atau rumah tangga. Keluaran tersebut tidak bisa serta merta menjadi ukuran untuk menentukan seseorang miskin atau tidak miskin. Ada aspek mendasar lainnya yang semestinya menjadi pusat perhatian dalam menganalisa tentang kemiskinan di masyarakat pedesaan.

Aspek mendasar tersebut adalah manusia atau warga desa itu sendiri. Manusia sebagai individu dan berasosiasi menjadi rumah tangga yang kemudian berkelompok menjadi satu komunitas/suku/bangsa/negara. Individu, rumah tangga atau komunitas tersebut memiliki/memilih sumberdaya/aset guna melangsungkan kehidupannya. Apa saja sumber daya tersebut? Bagaimana mengaksesnya? Bagaimana mengembangkan sumber daya tersebut? Apa saja hasil yang diperolehnya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi pijakan analisis pemberdayaan berbasis desa yang ingin ditawarkan dalam memotret kehidupan masyarakat desa di kabupaten Barito Kuala.

Dalam bagan di bawah ini, model pemberdayaan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah melalui tiga kata kunci utama yaitu aset, akses dan *outcomes*. Menurut Chambers and Conway<sup>6</sup> ada dua kategori aset, yaitu aset kasat mata (*tangible assets*) dan aset yang tidak kasat mata (*intangible assets*). Aset yang kasat mata adalah sumber daya yang relatif langsung berada dalam penguasaan seseorang/rumah tangga yang diperlukan untuk mendukung dan melangsungkan kehidupannya. Aset tersebut

---

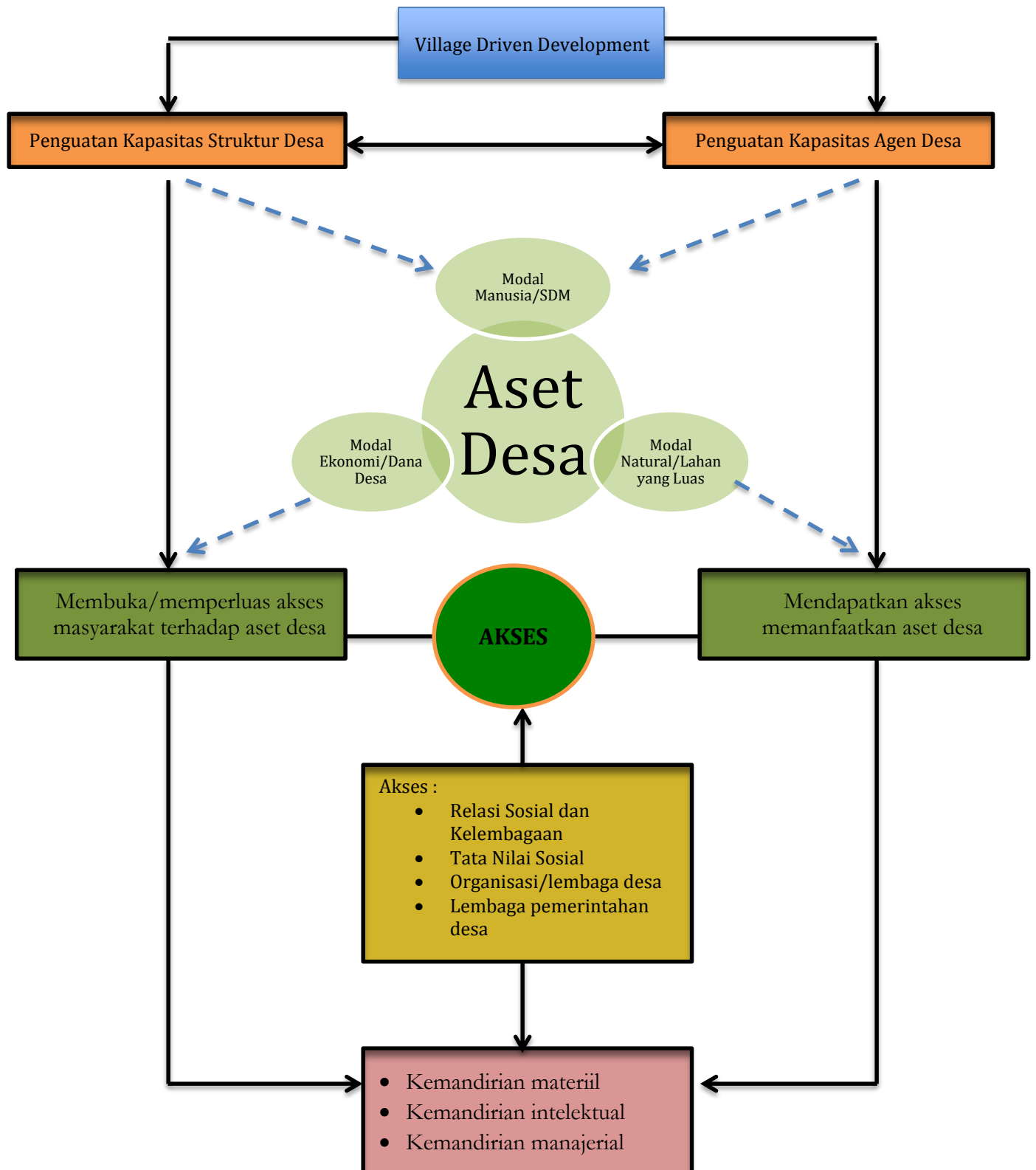
6

bisa berupa *natural capital*, *physical capital*, dan *financial capital*. Aset kasat mata yang dimiliki mayoritas warga desa yang tinggal di kabupaten Barito Kuala adalah *natural capital*, yaitu aset alam berupa lahan/tanah yang luas serta sungai yang membentang hampir di seluruh wilayah Barito Kuala dan *financial capital* berupa dana desa. Sedangkan aset lainnya berupa fisik memang masih belum optimal.

Di sisi yang lain, aset tidak kasat mata adalah klaim dan akses yang diperlukan oleh rumah tangga/seseorang agar mampu memperoleh manfaat atas sumber daya atau jasa yang relatif tidak dalam penguasaan secara langsung seperti *human capital* dan *social capital*. Jumlah penduduk yang cukup besar dapat menjadi aset bagi kabupaten Barito Kuala untuk memperkuat pembangunan desa dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan modal sosial di beberapa desa yang menjadi lokasi penelitian masih sangat rendah.

Keberadaan aset-aset yang dibutuhkan untuk penghidupan belum tentu dimiliki oleh semua orang. Kemampuan untuk menguasai aset yang belum dimiliki tersebut membutuhkan jalan masuk, jalur atau penghubung yang disebut dengan akses. Kemampuan untuk menguasai aset dapat diwujudkan melalui relasi sosial, kelembagaan dan organisasi. Relasi sosial seperti pandangan terhadap gender, etnisitas, adat tradisi atau kebiasaan bisa jadi membatasi atau malah memungkinkan seseorang untuk menguasai aset tertentu (memperoleh upah, membeli sawah atau menyewa toko di pasar). Keberadaan organisasi tentu juga sangat mempengaruhi penyediaan akses atas aset-aset yang dibutuhkan untuk penghidupan.

## Model Pemberdayaan Berbasis Pertanian di Kabupaten Barito Kuala



Aktor dalam organisasi pemerintahan bisa turut andil dalam menyediakan akses atas sumber daya penggerak kegiatan ekonomi desa.

### **E. BUMDes sebagai Akses untuk Mendapatkan Aset**

Pertanian merupakan sektor utama perekonomian masyarakat Barito Kuala. Hampir semua kecamatan di Barito Kuala merupakan sentra produksi beras, mulai dari kecamatan Tabunganen yang mampu berkontribusi 13,76% dari seluruh produksi beras sampai dengan kecamatan Jejangkit yang hanya menghasilkan 2,46% dari jumlah produksi beras pada tahun 2018. Padahal kecamatan Jejangkit memiliki aset lahan yang sangat luas yang mencapai 3 ribu hektar. Rendahnya produktivitas tersebut disebabkan sebagian besar lahan pertanian tersebut merupakan lahan rawa lebak. Meskipun demikian, pemerintah daerah Barito Kuala berencana untuk menjadikan wilayahnya sebagai lumbung padi bagi wilayah-wilayah lain yang ada disekitarnya, khususnya yang terletak di Propinsi Kalimantan Selatan. Keberadaan aset alam berupa lahan yang sangat luas menjadi modal dasar pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan wilayah dengan kemampuan berketahanan pangan.

Sayangnya, kepemilikan terhadap lahan pertanian yang luas tidak serta merta menjadikan para petani di Barito Kuala menjadi sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar petani Barito Kuala enggan menjual hasil panennya karena nilai jualnya yang sangat rendah. Mereka lebih memilih untuk menyimpan gabah hasil panen mereka untuk kemudian mereka konsumsi sendiri bersama keluarga.<sup>7</sup> Salah satu penyebab rendahnya nilai jual gabah produksi petani Barito

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan kepala desa Jejangkit Timur, Bapak Muamar

Kuala adalah keberadaan tengkulak yang membeli gabah petani dengan cara *door to door*. Setiap musim panen tiba, para tengkulak mulai datang ke desa untuk melakukan penawaran terhadap gabah hasil panen para petani secara langsung dari rumah ke rumah dengan harga yang tidak memadai.<sup>8</sup> Pada panen tahun 2018 yang lalu, petani di Barito Kuala hanya bisa menjual gabah (benih) mereka dengan harga Rp.4.200,- per kilogramnya. Rendahnya akses terhadap pasar dan rendahnya pengetahuan manajerial menyebabkan para petani menerima saja tawaran rendah yang diberikan oleh para tengkulak. Akibatnya, para petani tidak mampu memiliki penghasilan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Penghasilan mereka hanya mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Bukan hanya itu, keterbatasan kepemilikan aset finansial membuat kehidupan ekonomi mereka menjadi subsisten. Uang yang dipegang sehari-hari (*cash on hand*) lebih banyak diperuntukkan untuk bisa bertahan hidup daripada investasi.

Dengan kata lain kepemilikan terhadap aset alam berupa lahan pertanian yang luas belum tentu mampu membuat petani memiliki keberdayaan untuk sejahtera. Petani harus memiliki akses untuk membuat aset yang mereka miliki mempunyai nilai. Akses tersebut bisa diperoleh melalui relasi sosial, tatanan kelembagaan, organisasi dan bahkan lembaga pemerintahan desa. Untuk mempebesar akses maka perlu adanya struktur dan agen desa yang handal dalam membaca potensi dan persoalan yang ada di desanya.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan kepala desa Jejangkit Timur



Desa Jejangkit Timur adalah salah satu contoh desa di Barito Kuala yang berhasil mengenali potensi dan permasalahan lokal yang ada di desanya. Meskipun wilayah kecamatan Jejangkit secara umum dikenal sebagai produsen padi, kepala desa Jejangkit Timur berani mengatakan bahwa desa mereka tidak bisa menjadikan tanaman padi sebagai sumber utama perekonomian mereka. Inisiatif kepala desa Jejangkit Timur yang tentu saja telah mendapatkan persetujuan dan dukungan dari warganya untuk menggunakan sebagian dana desa membeli bibit sawit untuk ditanam para petani bukanlah tanpa alasan. Menurunnya produksi padi dari tahun ke tahun akibat kadar keasaman tanah yang tinggi dan keberadaan perusahaan kelapa sawit swasta yang berdiri di wilayah desanya menyebabkan pak Muamar menyadari potensi ekonomi desanya. Pak Muamar ingin agar desanya memiliki lahan sawit yang dikelola desa secara bersama sama dengan warga desa. Nantinya perusahaan kelapa sawit swasta yang ada di wilayahnya wajib untuk membeli sawit desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga warga desa tidak perlu khawatir mencari tahu bagaimana cara memasarkan hasil sawit mereka.

Bukan hanya itu, kepala desa Jejangkit Timur juga berhasil menginisiasi pelayanan air bersih yang pengelolaannya melalui BUMDes. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih di wilayahnya membuat kepala desa termotivasi untuk membangun “perusahaan air” yang saat ini telah mampu memberikan pelayanan kepada sekitar separuh dari jumlah warga desanya yang seluruhnya berjumlah 300 KK atau 1.200 jiwa. Instalasi air bersih desa ini dibangun pada tahun 2016 dengan dana desa sebesar 250 juta dan sisanya dilanjutkan pada tahun 2017 dengan dana desa 250

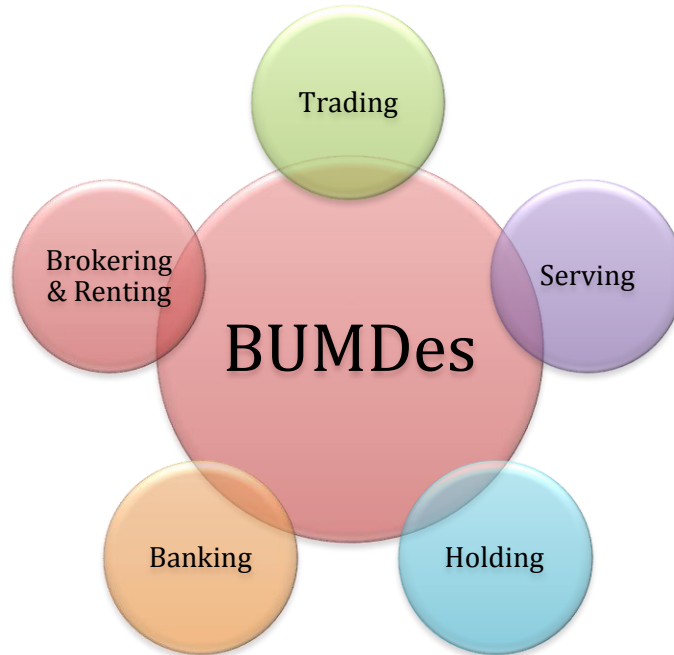
juta juga. Saat ini instalasi pengolahan air bersih tersebut mampu memperoleh penghasilan bersih rata-rata 4 juta rupiah tiap bulannya.

Desa Jejangkit Timur menjadi *pilot project* pengembangan BUMDes sebagai akses bagi desa dan warga desa untuk menjadikan aset desa dan aset warga desa memiliki nilai/berharga. Aset lahan yang dimiliki warga desa menjadi lebih bernilai karena lahan tersebut sekarang dapat bermanfaat dengan ditanami sawit. Sedangkan aset berupa air sungai yang mengairi desa Jejangkit Timur menjadi bernilai karena sudah dapat dikonsumsi masyarakat melalui jaringan instalasi air bersih desa. Tadinya air sungai Jejangkit keruh dan sangatlah asam dengan PH 2 sampai PH3 sehingga tidak layak untuk digunakan dan dikonsumsi.

Berkaca dari keberhasilan desa Jejangkit Timur dalam menggunakan dana desa untuk membuat aset desa yang baru berupa perusahaan air bersih dan perkebunan sawit desa maka ada kemungkinan pula desa-desa lainnya yang ada di Barito Kuala memiliki kesempatan yang serupa dalam mengembangkan potensi desa yang mereka miliki. Memperkuat ekonomi kerakyatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan merupakan jalan keluar yang lebih berkelanjutan daripada sekedar melaksanakan program *pro poor* dengan meningkatkan akses rumah tangga miskin pada pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan primer lainnya. Dengan ekonomi kerakyatan, pemerintah desa dan warganya dituntut untuk menguatkan kapasitas usaha skala kecil dan mikro di tingkat desa dalam berproduksi, daya saing melalui peningkatan kualitas produksi, manajemen usaha dan pemasaran, serta memperkuat iklim berusaha.

## F. Membangun BUMDes yang Sesuai dengan Aset Desa

Pada dasarnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukanlah hal yang benar-benar baru meski nomenklatur itu memang baru diperkenalkan dalam UU No.32 tahun 2004, PP No.72 tahun 2005 dan Permendagri No.39 Tahun 2010. Sebelumnya kita telah mengenal berbagai institusi sosial dan keuangan mikro yang mirip dengan BUMDes yang dibentuk pemerintah seperti Koperasi Unit Desa (KUD), KUPeDES, BUUD, sampai dengan yang belakangan hadir dan dibentuk oleh kementerian sektoral seperti PNPM Mandiri Perdesaan. Semua lembaga tersebut merupakan lembaga keuangan mikro yang dibentuk pemerintah untuk membantu masyarakat desa terlepas dari jeratan rentenir atau tengkulak dan membuka akses kredit bagi mereka.



Di dalam UU Desa NO.6 Tahun 2014 disebutkan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Artinya, keberadaan BUMDes hendaknya mampu membangun dan mengembangkan aset yang dimiliki oleh desa sekaligus sebagai ruang bagi seluruh warga desa untuk terlibat secara aktif sehingga mereka tidak hanya ikut berperan dalam mengembangkan aset desa tetapi juga dapat mengakses aset desa tersebut bersama-sama.

**Tabel 1. Kecenderungan Potret Umum dan Kinerja BUM Desa**

<b>Tipe</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Tujuan dan Sifat</b>	<b>Kinerja</b>	<b>Manfaat</b>
<i>Serving</i>	Air Bersih	Memberikan social benefit, tidak economic profit meskipun memperoleh laba. Ini bisnis sosial yang sederhana dan tidak terlalu rumit	Lancar dan sehat. Didukung dengan antusias oleh warga. Pasar tidak menjadi problem, namun sering terkendala problem teknis dan manajerial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi layanan dasar kepada masyarakat, terutama kaum miskin dan perempuan.</li> <li>• Pendapatan desa</li> <li>• Meningkatkan kualitas kesehatan</li> </ul>
<i>Banking</i>	Simpan pinjam	Memberi kredit kecil yang lunak dan mudah kepada warga. Umumnya dibentuk secara serentak dan seragam oleh pemerintah	Sebagian kecil yang berkembang dan sukses, sebagian besar mati suri (gulung tikar).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses kredit/pinjam yang mudah</li> <li>• Mengurangi jerat rentenir</li> </ul>

<i>Brokering dan Renting</i>	Jasa pembayaran listrik dan penyewaan	Meningkatkan pendapatan desa. Ini merupakan bisnis yang sederhana dan menguntungkan, tidak terkendala faktor pasar.	Berjalan secara sehat dan memberikan keuntungan secara variatif tergantung skala ekonominya. Contoh: urban villages di DIY dapat keuntungan besar dengan bisnis penyewaan	Ekonomi desa semakin bergairah, pendapatan desa meningkat serta meningkatkan kinerja pembangunan desa. Traktor bahkan menjadi instrumen proteksi bagi petani.
<i>Trading</i>	Bisnis saprotan dan kebutuhan pokok serta bisnis hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Internal desa : melayani kebutuhan masyarakat setempat</li> <li>• Eksternal: menjual hasil pertanian keluar dan meningkatkan pendapatan</li> <li>• Bisnis internal desa relatif sederhana serta berskala kecil-lokal, tetapi bisnis eksternal sangat kompleks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisnis internal berjalan dan berkembang dengan skala kecil</li> <li>• bisnis eksternal rentan dan mati suri karena keterbatasan (kualitas, skala, kapasitas, modal, pasar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat setempat mudah memperoleh kebutuhan pokok dan saprotan, bisa dengan cara kredit</li> <li>• Bisnis eksternal belum memberikan manfaat secara signifikan</li> </ul>
<i> Holding</i>	Desa wisata	Mengonsolidasikan berbagai jenis usaha lokal yang terkait dengan wisata, guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa.	Berkembang secara sehat, kokoh dan berkelanjutan	Menggairahkan perekonomian desa dan membuka lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat

Sumber : Sutoro Eko, Desa Membangun Desa, Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS), FPPD, 2014

Sebagian besar desa di lokasi penelitian memiliki BUMDes. Hanya saja tidak semua BUMDes sukses dalam menjalankan bisnis ekonominya. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah BUMDes dalam mengelola aset desa diantaranya adalah faktor kepemimpinan, manajerial dan tata kelola, kekayaan modal sosial dan modal politik, skala dan jangkauan usaha. Gambaran tentang keberadaan BUMDes di lokasi penelitian dijelaskan di bawah ini.

- Pengembangan BUMDes Desa Patih Muhur Lama dan Desa Sungai Gampa

Desa Patih Muhur Lama merupakan desa yang terletak di kecamatan Anjir Muara, penghasil beras terbesar ketiga setelah kecamatan Tabunganen dan Tabukan. Desa ini juga menjadi penghasil jeruk siam terbesar di kecamatan. Jeruk siam adalah salah satu varietas jeruk unggul dan khas yang dikembangkan di propinsi Kalimantan Selatan. Rasanya yang manis dan buahnya yang besar menjadikan jeruk siam ini menjadi primadona di kalangan masyarakat lokal. Biasanya petani di desa Patih Muhur Lama membudidayakan tanaman jeruk ini berbaris dengan sistem surjan, yaitu sistem penataan lahan yang memadukan sistem basah dan kering secara berdampingan. Teknologi ini merupakan kearifan lokal masyarakat rawa di Barito Kuala yang diwariskan secara turun menurun. Sayangnya, biaya untuk menggunakan sistem ini memang masih dipandang mahal oleh sebagian besar petani. Berdasarkan hasil penelitian Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra) Banjarbaru, pembuatan sistem surjan secara manual bisa menghabiskan sekitar 11 juta per hektar.

Menurut Ibu Nurjannah<sup>9</sup>, budidaya jeruk siam di desanya memiliki potensi untuk berkembang menjadi usaha bisnis lainnya, seperti produksi minuman kemasan (sirup) sehingga mampu memiliki nilai jual yang lebih dan dapat dipasarkan dalam skala yang jangkauannya lebih luas. Potensi pengembangan aset desa yang dikemukakan oleh Ibu Nurjannah tersebut hingga saat ini belum mendapatkan respon positif dari pemerintah daerah.

Selama ini buah jeruk hasil produksi desa Patih Muhur Lama hanya dipasarkan di pasar lokal. Para petani tidak memiliki akses pasar yang lebih luas. Hal ini disebabkan karena para petani cenderung hanya menunggu “pengepul” atau “tengkulak” datang ke desa untuk membeli jeruk mereka. Tentu saja harga jual jeruk mereka menjadi lebih rendah jika penjualannya dilakukan melalui tengkulak atau pengepul ketimbang jika mereka jual sendiri ke daerah lain. Selain itu, hambatan utama para petani untuk menjual langsung ke pasar-pasar yang ada di wilayah lain adalah keterbatasan transportasi. Jalan masuk ke desa yang sempit dan hanya bisa diakses oleh kendaraan roda dua menjadi kendala pemasaran jeruk dalam jumlah yang besar.

Menurut peneliti, hambatan yang dihadapi desa Patih Muhur Lama dalam mengembangkan potensi dan aset desa dapat diatasi dengan mengembangkan BUMDes yang berbasis pada *trading*. BUMDes menjadi tempat para petani untuk menjual jeruk dan padi hasil panen. Para petani juga bisa membeli saprotan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ketua PKK Desa Patih Muhur Lama

melalui BUMDes secara kredit. Artinya BUMDes juga bisa mengembangkan usahanya melalui simpan pinjam untuk warga desa.

### **G. Luasnya Lahan sebagai Aset Memberdayakan Perekonomian Desa**

Sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala selain sektor kehutanan dan perikanan. Nilainya pun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Merujuk pada data BPS, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan telah menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 2.1 triliun rupiah atau 28% dari total nilai PDRB pada tahun 2017 yang mencapai 7.4 triliun rupiah. Oleh karena itu pemerintah daerah menjadikan kemampuan berketahanan pangan sebagai misi kabupaten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Barito Kuala memang memiliki lahan yang sangat luas dan belum digunakan secara optimal. Menurut data BPS pada tahun 2017, ada 120.037 hektar luas lahan sawah yang tersebar di 17 kecamatan dan 112.323 hektar diantaranya merupakan sawah non-irigasi. Kondisi tanah yang mayoritas berawa menyebabkan lahan pertanian yang dapat dikembangkan adalah lahan pertanian pasang surut. Sebenarnya, sejak tahun 1920-an, pemanfaatan lahan rawa pasang surut untuk pertanian sudah dilakukan di Kalimantan Selatan.<sup>10</sup> Pemanfaatan lahan rawa pasang surut semakin luas setelah adanya Proyek Pembukaan Persawahan Pasang Surut (P4S) bersamaan dengan program transmigrasi dari Jawa (1969-1982). Dibalik kekurangannya, seperti tingkat

---

<sup>10</sup> H. Idak, *Perkembangan dan Sejarah Persawahan di Kalimantan Selatan*, Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Banjarmasin.



kemasaman tanah yang tinggi, miskin hara, dan intensitas gangguan hama penyakit dan gulma yang tinggi,<sup>11</sup> lahan rawa memiliki keunggulan dalam hal ketersediaan air. Pada saat lahan kering dan tadah hujan, bahkan sebagian lahan irigasi tidak mungkin lagi diusahakan karena kekurangan air, lahan pasang surut masih mungkin diupayakan dengan berbagai komoditas tanaman pangan dan hortikultura.

## **H. Penguatan Kapasitas Struktur dan Agen Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa**

Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2015 tentang Desa sudah memasuki tahun ke-5, tetapi tujuan pengaturan desa belum tercapai, yaitu mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengetahui potensi dan aset desa yang mereka miliki sehingga dapat dikembangkan untuk kesejahteraan bersama. Salah satu hambatan terbesar bagi pencapaian tujuan ini adalah penyelenggaraan desa yang masih eksklusif. Artinya, prakarsa dan pengembangan ekonomi lokal lebih banyak dilakukan oleh elit dan pemerintah desa. Semestinya semua masyarakat desa memiliki akses yang sama pada semua aset dan potensi desanya.

Oleh karena itu, pengembangan ekonomi lokal berbasis aset desa semestinya melibatkan semua pihak, tidak hanya elit pemerintah desa, namun juga kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga marjinal yang ada di desa, sebut saja kelompok tani, perkumpulan ibu-ibu PKK, kelompok nelayan, karang taruna, koperasi dan lain-lain.

---

<sup>11</sup> Widjaya Adhi, Nugroho, *et.al*, "Sumber Daya Lahan Pasang Surut, Rawa dan Pantai : Potensi, Keterbatasan dan Pemanfaatan", dalam *Pengelolaan Air dan Produktivitas Lahan Rawa Pasang Surut (Pengalaman dari Kalimantan Selatan dan Tengah)*, Badan Litbang Pertanian, 1992.

Kecenderungan yang terjadi selama ini di beberapa desa yang ada di Kabupaten Barito Kuala adalah kelompok-kelompok marjinal tersebut hanya menjadi obyek dari kebijakan pengembangan ekonomi yang telah dibuat oleh pemerintah daerah ataupun nasional. Seperti yang terjadi di desa Purwosari I, masyarakat petani pernah mendapatkan bibit ikan nila untuk bisa dikembangbiakkan. Sayangnya, pemberian bibit ikan tersebut tidak diiringi dengan pemahaman kondisi sungai yang memiliki tingkat keasaman tinggi sehingga program tersebut gagal.

### **I. Modal Sosial dan Adaptasi Masyarakat Desa Jejangkit Timur dalam Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit**

Desa Jejangkit Timur merupakan salah satu desa di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan yang memiliki wilayah sangat luas karena mencakup 59 persen dari luas wilayah kecamatan Jejangkit, yaitu 120 km persegi. Desa Jejangkit Timur berbatasan dengan Kecamatan Cirebon di sebelah utara, Kecamatan Rantau Badauh di sebelah timur, Desa Jejangkit Barat di sebelah barat, dan Kabupaten Banjar di sebelah selatan. Secara administratif desa Jejangkit Timur ini memiliki dua wilayah yakni wilayah yang dihuni oleh penduduk asli Banjar dan UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi).

Sebagai salah satu daerah tujuan transmigrasi, desa Jejangkit Timur kedatangan para pendatang yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY dan Jakarta. Keberadaan UPT di Desa Jejangkit Timur diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. Dalam sejarahnya, program transmigrasi di Kabupaten Barito Kuala sudah dimulai

sejak tahun 1937, dengan ditempatkannya 95 Kepala Keluarga (KK) penduduk asal Jawa Timur ke lokasi wilayah Anjir. Setelah itu kawasan lain seperti Barambai, Tabunganen, Kuripan, dan Wanaraya ikut dibuka dengan ditempatkannya transmigran asal Jawa, Bali dan NTT. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama (lebih dari 30 tahun), saat ini wilayah-wilayah transmigran tersebut telah berkembang cukup maju, bahkan ada yang menjadi ibukota kecamatan, seperti kecamatan Wanaraya dan Anjir (Suyuti, 2011).

Secara demografis, desa Jejangkit Timur memiliki jumlah penduduk terbesar di wilayah kecamatan Jejangkit. Saat ini (tahun 2018) dihuni oleh 313 kepala keluarga yang terdiri dari 563 orang penduduk laki-laki dan 520 orang penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sebesar kurang lebih 5% jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Komoditas pertanian yang ditanam masyarakat UPT Jejangkit Timur pada awal kedatangannya masih beragam seperti padi, buah-buahan (jeruk), sayur-sayuran dan lain-lain. Petani yang mengusahakan tanaman padi sawah pada umumnya lebih bersifat subsisten sedangkan komoditi lainnya lebih bersifat komersial. Komoditi pertanian bersifat subsisten adalah ketika produksi pertanian tersebut hanya melibatkan keluarga inti dan hubungan dengan pekerja bersifat egaliter. Sedangkan komoditas pertanian komersial adalah usaha pertanian yang sudah berorientasi pada pasar.

Komoditas padi yang dihasilkan para petani di Desa Jejangkit Timur pada umumnya disimpan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Benih padi hanya akan dijual jika ada kelebihan produksi atau sedang membutuhkan uang. Sedangkan

komoditas pertanian berupa sayur-sayuran dan tanaman palawija biasanya memang menjadi komoditas komersial yang diperjual belikan.

Perkenalan masyarakat desa Jejangkit Timur dengan komoditas kelapa sawit dimulai sejak hadirnya perusahaan swasta perkebunan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Jejangkit, yaitu PT ABS pada tahun 2007. Selain diperkenalkan secara tidak langsung oleh perusahaan tersebut, pemerintah daerah kabupaten Barito Kuala juga memberikan sosialisasi

Perubahan produksi pertanian masyarakat dari komoditi campuran dengan moda produksi campuran (subsisten dan komersil) menjadi komoditi yang homogen yaitu kelapa sawit dengan moda produksi kapitalis dipengaruhi oleh beberapa hal yang dikelompokkan ke dalam dua aspek yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal menyangkut tingkat pengetahuan masyarakat dan tingkat pemilikan modal masyarakat untuk menanam dan merawat kebun kelapa sawit, sedangkan faktor eksternal terkait dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang secara tidak langsung mendukung aktifitas warga desa Jejangkit Timur untuk menanam kelapa sawit sebagai komoditas perkebunan yang potensial untuk dikembangkan.

Secara teoritik, program PP KTM ini sebenarnya sangat prospektif. *Pertama*, pemerintah daerah yang wilayahnya termasuk program ini dapat memanfaatkannya untuk membuat perencanaan dan melaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi daerah yang sedang berupaya membangun kawasan yang didasari dari keinginan dari bawah, yaitu dapat menggali apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan kondisi riil di lapangan. *Kedua*, pendekatan program PP KTM adalah pembangunan dan pengembangan yang bertujuan menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan menimbulkan dampak perubahan ekonomi yang positif bagi penduduk kawasan sekitar (Suyuti, 2011).

Untuk menunjang langkah-langkah tersebut Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sudah membuat peraturan daerah (perda) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kota Terpadu Mandiri yang menetapkan kawasan seluas 51.945 ha di enam wilayah kecamatan termasuk kecamatan Jejangkit. Dalam perkembangannya, perda tersebut direvisi dengan memasukkan sebagian wilayah kecamatan Marabahan dan lainnya sebagai wilayah pengembangan.

Dengan demikian kunci untuk strategi pembangunan kawasan KTM sebaiknya adalah pembangunan industri-industri agro secara padat karya dan aplikasi teknologi tepat guna secara luas untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah pedesaan, seperti manajemen air, pemanfaatan tanah, eksplorasi energi, pemasaran, kesehatan, dan jasa-jasa penunjang lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

Anderson, James E. 1997, *Publik Policy Making*, New York : Holt Reinhart and Winston.

Abdul Wahab, Solichin. 1991. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity Press.

Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM.

Dye, Thomas R. 1992. *Understanding Public Policy*. New Jersey, United State of America: Prince Hall, Englewood Cliffs.

Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Goggin, Malcolm L., et al. 1990. *Implementation Theory and Practice: Toward and Third Generation*. Illinois: Scoot, Foresman and Company.

Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik. (Public Policy) Diterjemahkan oleh Ricky Ismanto*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Meter, Donal, Van and Carl E. Van Horn. *The Policy Implementation Process*. Beverly Hill: Sage Publication.

Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Wahab, Solicin Abdul. 2007. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Model Model Implementasi Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

### Jurnal

Mazmanian, Daniel A. and Sabatier, Paul A. " A Multivariate Model of Public Policy-Making". *American Journal of Political Science*, Vol. 24, No. 3 (Agustus, 1980), hal. 439-468

Sabatier, Paul A. "Top-Down And Bottom-Up Approaches To Implementation Research : A Critical Analysis and Suggested Synthesis". *Journal of Public Policy*, Vol. 6, No. 1 (Jan-Mar, 1986), hal. 21-48

### **Dokumen Pemerintah**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018